

PERAN ORGANISASI DALAM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS)

Submission date: 23-Nov-2023 10:40AM (UTC-0500)
by Bate'e Roni Triswan

Submission ID: 2236960740

File name: RONI_BATEE_BAB_I_-Turnutin.docx (732.29K)

Word count: 17415

Character count: 118410

**PERAN ORGANISASI DALAM PENCEGAHAN PELECEHAN SESKSUAL
PADA ANAK (STUDI KASUS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN NIAS)**

SKRIPSI



Oleh

Roni Triswan Batee

NIM 2319426

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern ini, isu pelecehan seksual telah menjadi salah satu tantangan utama dalam berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Pelecehan seksual tidak hanya merugikan korban secara fisik dan emosional, tetapi juga mengancam hak asasi manusia dan integritas sosial. Organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan yang merugikan, melanggar, dan tidak etis terhadap seseorang dengan unsur-unsur seksual. Bentuk pelecehan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di tempat kerja dan organisasi. Pelecehan seksual mencakup perilaku seperti komentar tidak senonoh, perlakuan merendahkan, dan tindakan fisik yang tidak diinginkan dengan unsur seksual. Fenomena ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius pada korban dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan sifat seksual yang merendahkan martabat seseorang. Ini dapat mencakup ucapan, perilaku, atau tindakan fisik yang tidak diinginkan dan tidak pantas, yang menargetkan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau karakteristik seksual mereka. Menurut World Health Organization (WHO), pelecehan seksual adalah penggunaan kekuatan, ancaman, atau tindakan kekerasan lainnya untuk memaksa seseorang melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak setuju. Sedangkan menurut United Nations (UN) PBB mendefinisikan pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau upaya memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, melalui penggunaan kekerasan, tekanan, atau ancaman.

Pelecehan seksual dalam lingkungan organisasi adalah tindakan yang melanggar norma dan etika seksual dengan sengaja dilakukan oleh individu di dalam suatu organisasi terhadap individu lain yang memiliki hubungan kerja atau keterlibatan organisasi. Pelecehan ini dapat mencakup komentar merendahkan, ejekan, ancaman, perlakuan diskriminatif, hingga tindakan fisik yang tidak senonoh. Tujuan pelecehan ini bisa beragam, termasuk mengintimidasi, memperoleh keuntungan seksual, atau menguasai seseorang.

Menurut UN Women (2015) UN Women menggambarkan pelecehan seksual dalam lingkungan organisasi adalah segala jenis perilaku tidak diinginkan yang memiliki unsur-unsur seksual, termasuk kata-kata, tindakan, atau komunikasi lainnya yang merendahkan atau membuat tidak nyaman. Sedangkan menurut Renee Galizio (2011: 221): Galizio mengartikan bahwa dalam lingkungan organisasi tindakan-tindakan, kata-kata, atau perilaku yang mengandung konotasi seksual dan menimbulkan lingkungan kerja yang tidak aman, terutama untuk perempuan.

Kabupaten Nias sebagai wilayah dengan keanekaragaman budaya dan sosial memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga lingkungan yang aman dari pelecehan seksual. Dinas Sosial Kabupaten Nias memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan yang lebih berisiko menjadi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Nias menjalankan perannya dalam mencegah dan mengatasi pelecehan seksual di wilayahnya.

Keanekaragaman budaya dan sosial, menghadapi tantangan khusus dalam menjaga lingkungan yang aman dari pelecehan seksual. Faktor-faktor seperti keberagaman budaya, norma-norma sosial yang beragam, serta perbedaan pandangan terhadap isu-isu seksual dapat memengaruhi cara masyarakat merespons dan mengatasi masalah pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial saat mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual di Kabupaten Nias.

Keberagaman budaya yang kaya dan kompleks. Setiap daerah memiliki tradisi, norma, dan nilai-nilai yang unik, termasuk dalam konteks hubungan antara jenis kelamin. Norma dan nilai-nilai ini dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap interaksi sosial, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Oleh karena itu, penanganan pelecehan seksual perlu mempertimbangkan keragaman ini agar langkah-langkah pencegahan dan penanganan dapat menghormati dan mempertimbangkan budaya setempat. Norma sosial yang berbeda antara kelompok budaya juga dapat memengaruhi bagaimana pelecehan seksual diidentifikasi dan dilaporkan. Beberapa kelompok masyarakat memiliki norma yang cenderung menutupi masalah pelecehan seksual karena faktor malu atau stigma yang melekat. Sementara kelompok lain lebih terbuka dalam mendiskusikan isu ini. Dalam menghadapi keberagaman norma sosial ini, peran organisasi menjadi penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi korban untuk melaporkan pelecehan seksual tanpa rasa takut atau malu.

Perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap isu-isu seksual juga dapat mempengaruhi respon terhadap pelecehan seksual. Kelompok masyarakat memiliki pandangan yang lebih konservatif tentang seksualitas dan cenderung menilai korban daripada pelaku. Pandangan ini dapat memengaruhi ketersediaan dukungan dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, pencegahan pelecehan seksual harus dilakukan dengan mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak seksual, pemahaman yang benar mengenai pelecehan, serta pentingnya mendukung korban.

Keanekaragaman budaya dan sosial membawa tantangan khusus dalam menjaga lingkungan yang aman dari pelecehan seksual. Organisasi, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Nias, perlu mengadopsi pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan pandangan masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan program pencegahan pelecehan seksual. Menghormati keberagaman budaya dan sosial serta memberikan edukasi yang komprehensif adalah langkah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua individu.

Peran Dinas sosial Kabupaten Nias Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mempunyai tugas membatu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kabupaten Nias (sebagaimana tertuang pada Lampiran IX, Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021).

Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2007 pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah mereka.
- b. Mengaitkan orang dengan sistem sumber.
- c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan, maupun relasi antarorang di lingkungan sistem sumber.
- d. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan, maupun relasi antarorang di dalam lingkungan sistem sumber.
- e. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan serta perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.
- f. Meratakan sumber-sumber material.
- g. Bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

Peranan umum pekerja sosial menurut Robert J. Teare dan Harold L. McPheeters dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial RI (2003:50) terdiri dari:

- a. Penjangkau (outreach worker), mengidentifikasi kebutuhan dengan menjangkau klien di dalam masyarakat.
- b. Pialang (broker), membantu sasaran atau penerima pelayanan untuk mengakses pelayanan yang dibutuhkannya melalui pemberian informasi.
- c. Advokat, membantu sasaran atau penerima pelayanan untuk memperoleh pelayanan yang selama ini sulit dijangkaunya. Juga membantu perluasan jangkauan pelayanan sehingga dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkannya.
- d. Evaluator, mengumpulkan informasi dan menganalisis kebutuhan sasaran atau masyarakat guna penentuan alternative tindakan atau rencana tindak.
- e. Pengajar, mengajarkan fakta dan keterampilan.
- f. Manajer data, mengumpulkan dan menganalisis data guna pengambilan keputusan.
- g. Administrator, merencanakan dan melaksanakan pelayanan atau program.

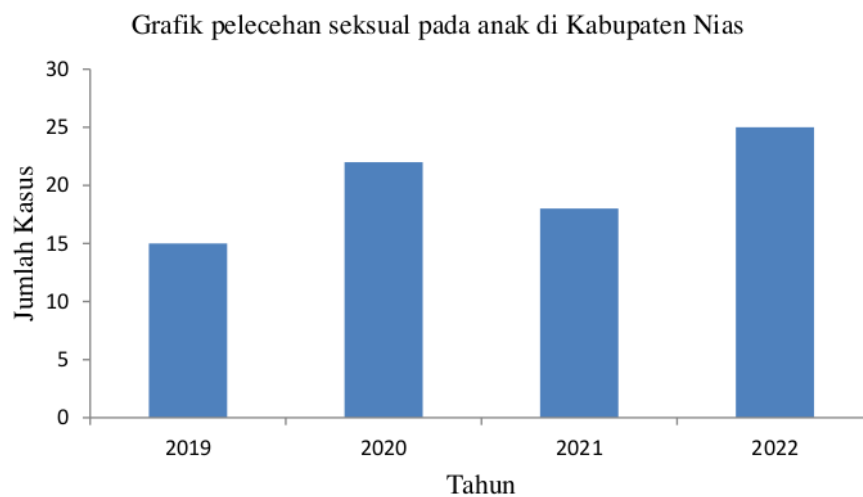
Data tabel yang mencerminkan masalah Pelecehan Seksual pada anak di Kabupaten Nias selama empat tahun terakhir:

| No | Tahun | Jumlah Kasus Pelecehan Seksual | Kasus yang sudah di proses | Kasus yang belum di proses |
|----|-------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2019 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | 2020 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | 2021 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | 2022 | 25 | 15 | 10 |

Jumlah Kasus yaitu menunjukkan jumlah total kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Nias pada setiap tahun yang dijadikan acuan, Kasus yang Sudah Diproses Merupakan jumlah kasus pelecehan seksual pada anak yang telah melalui proses hukum atau penanganan dari Dinas Sosial atau instansi terkait, Kasus yang Belum Diproses merupakan jumlah kasus pelecehan seksual pada

anak yang belum melalui proses hukum atau penanganan dari Dinas Sosial atau instansi terkait minimal pada tahun yang tercantum.

Berdasarkan data di atas, terdapat peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Nias dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, terdapat 15 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 7 kasus telah diproses, sementara 8 kasus masih dalam proses penanganan. Pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat menjadi 22 kasus. Dari jumlah tersebut, 15 kasus telah diproses, sementara 7 kasus masih dalam proses penanganan. Pada tahun 2021, tercatat 18 kasus kekerasan pelecehan seksual pada anak. Dari jumlah tersebut, 10 kasus telah diproses, sementara 8 kasus masih dalam proses penanganan. Pada tahun 2022, jumlah kasus mencapai 25 kasus. Dari jumlah tersebut, 18 kasus telah diproses, sementara 7 kasus masih dalam proses penanganan.



Sumber. olahan penulis,2023

Berdasarkan grafik diatas, selama Tahun 2019 sampai 2022 tercatat laporan kekerasan pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Nias yaitu, Tahun 2019 15 kasus, meningkat menjadi 22 kasus Tahun 2020, Tahun di 2021 mengalami

penurunan menjadi 18 kasus dan kemudian di tahun 2022 meningkat kembali di 25 kasus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan Judul “Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak (studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias)”

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran yang dimainkan oleh sebuah organisasi, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Nias, dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Nias terlibat dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak?
2. Apa saja kebijakan, program, dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam mencegah pelecehan seksual pada anak?
3. Bagaimana efektivitas langkah-langkah yang telah diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan program yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam upaya mencegah pelecehan seksual pada anak.
3. Untuk mengetahui efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak.

1.5 Hasil Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Bagi Teoritis
 - a) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang peran organisasi, khususnya Dinas Sosial, dalam mencegah

pelecehan seksual pada anak. Ini bisa membantu mengisi celah pengetahuan yang mungkin ada dalam literatur terkait.

- b) Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual pada anak dan peran organisasi dalam hal ini. Teori ini bisa menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait.
- c) Penelitian ini juga dapat memvalidasi atau membuktikan teori-teori yang telah ada sebelumnya tentang pencegahan pelecehan seksual dan peran dinas sosial dalam hal ini.

2. Manfaat Bagi Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Nias, dalam merancang kebijakan dan program pencegahan pelecehan seksual yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal.
- b) Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini bisa digunakan dalam kampanye penyuluhan dan sosialisasi.
- c) Penelitian ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi area-area di mana tenaga kerja di bidang sosial perlu ditingkatkan dalam hal pencegahan, pengenalan, dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak. Ini dapat mendorong penyediaan pelatihan yang lebih baik bagi mereka yang bekerja di lapangan.
- d) Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang saat ini ada dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak di wilayah tersebut. Jika program-program ini ada, penelitian ini dapat membantu mengukur apakah mereka mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran Organisasi

2.1.1 Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran atau peranan secara etimologi adalah bagian dan tugas yang harus dilaksanakan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2018), Peran merupakan kumpulan perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki suatu posisi atau status tertentu dalam suatu kelompok atau organisasi. Peran juga mencakup tanggung jawab, tugas, dan fungsi yang harus dilaksanakan individu dalam posisi tersebut. Pengertian ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu:

1. Peran melibatkan perilaku tertentu yang diharapkan dari individu yang mengisi suatu posisi. Ini mencakup tindakan dan interaksi dengan anggota kelompok atau organisasi lainnya.
2. Peran terkait dengan posisi atau status individu dalam kelompok atau organisasi. Setiap posisi memiliki peran yang unik yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut.
3. Peran mencakup tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu dalam posisinya. Tanggung jawab ini berkaitan dengan tugas, kewajiban, dan pekerjaan yang harus diselesaikan.
4. Peran juga mencakup tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan oleh individu dalam posisinya. Fungsi-fungsi tertentu juga dapat terkait dengan peran tersebut, seperti pengambilan keputusan, koordinasi, atau pengawasan.

Menurut Lepa dkk (2019:3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut

sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi. Paham strukturisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu. Sedangkan paham interaksi adalah paham yang mengutamakan pergerakan seseorang dalam menjalankan aktivitas dengan kondisi yang aktif dan terus menerus berkembang dalam tingkatan-tingkatan kehidupan yang diduduki oleh seseorang. Oleh karena itu ia ingin selalu berusaha tampil berbeda untuk disegani masyarakat luas yang diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat luas menjadi lebih baik berdasarkan posisi atau kedudukannya.

Sedangkan menurut Kurnia (2019:42) peran diartikan sebagai wujud nyata tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat. Terdapat tiga posisi yang ada di masyarakat yaitu posisi tinggi, posisi sedang dan posisi rendah. Kedudukan adalah tempat menjalankan hak dan kewajibannya dimana dalam menjalankannya tersebut diperlihatkan oleh masyarakat agar terlihat mumpuni orang ini lah yang menjadi pemegang peran. Oleh karena itu kedudukan seseorang menentukan

sseberapa besar wewenang yang dijalakannya begitunya juga hak tergantung pada seberapa bbesar hak yang diterimanya dalam melaksanakan kedudukannya.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.

2.1.2 Bentuk – Bentuk Peran

Menurut Henry Mintzberg (2019) ada beberapa bentuk-bentuk peran sebagai berikut:

1. Peran Interpersonal yaitu Peran sebagai pemimpin, penghubung, dan figur simbolik.
2. Peran Informasional yaitu Peran sebagai pengumpul, pemroses, dan penyebar informasi.
3. Peran Keputusan yaitu Peran sebagai pengambil keputusan strategis.

Sedangkan Menurut John P. Kotter (2020), bentuk-bentuk peran yaitu:

1. Peran Visioner; Menetapkan arah dan visi organisasi.
2. Peran Penggerak; Mendorong dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan.
3. Peran Pelatih; Membantu pengembangan dan peningkatan karyawan.
4. Peran Penghubung; Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak.

2.1.3 Indikator Peran

Indikator peran merujuk pada tanda atau petunjuk yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi sejauh mana seseorang atau suatu kelompok berhasil dalam menjalankan peran mereka. Indikator peran dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya mereka memberikan informasi tentang pencapaian tujuan, kinerja, kompetensi, atau tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam peran tertentu.

Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha (2018: 21), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antar pribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

2.2 Konsep Pencegahan

2.2.1 Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan atau usaha yang diambil untuk mencegah atau mengurangi terjadinya suatu masalah, ancaman, atau risiko. Tujuannya adalah untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu kejadian atau situasi yang tidak diinginkan. Pencegahan dapat mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, kejahatan, lingkungan, dan lainnya.

Menurut (Nasry, 2006) Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data / keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan / penelitian epidemiologi. Pencegahan dalam epidemiologi dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Pencegahan Primer; Ini adalah tahap awal pencegahan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyakit secara keseluruhan. Tindakan di tingkat ini biasanya difokuskan pada mengurangi paparan terhadap faktor risiko yang diketahui. Contohnya adalah vaksinasi, edukasi tentang gaya hidup sehat, dan kampanye antirokok.
2. Pencegahan Sekunder; Pada tingkat ini, tujuan adalah mendeteksi dan mencegah penyakit pada tahap dini, ketika masih mungkin untuk mengatasi atau memperlambat perkembangan penyakit. Ini termasuk skrining kesehatan, pemeriksaan berkala, dan deteksi dini penyakit.
3. Pencegahan Tersier; Ini berfokus pada mengurangi dampak penyakit yang sudah ada atau mencegah komplikasi lebih lanjut. Ini melibatkan pengelolaan penyakit kronis, rehabilitasi, dan pengurangan dampak kesehatan yang mungkin terjadi.

Semua tingkatan pencegahan dalam epidemiologi didasarkan pada analisis data dan informasi epidemiologi. Data ini membantu mengidentifikasi populasi yang berisiko tinggi, mengukur efektivitas intervensi yang diambil, dan memandu keputusan dalam merencanakan tindakan pencegahan yang lebih baik di masa depan. Dengan menggunakan pendekatan yang berbasis bukti ini, pencegahan dalam epidemiologi membantu mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan yang tepat waktu dan efektif.

2.2.2 Tujuan Pencegahan

Menurut Ira C. Colby (2009) tujuan pencegahan adalah untuk menghindari atau mengurangi risiko penyakit atau kondisi kesehatan melalui tindakan proaktif, seperti kampanye penyuluhan, vaksinasi, dan perubahan gaya hidup. Tujuan

pencegahan merujuk pada sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui upaya-upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghindari, mengurangi, atau mengatasi masalah, risiko, atau dampak negatif tertentu. Tujuan pencegahan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, apakah itu dalam bidang kesehatan, kecelakaan, lingkungan, sosial, atau bidang lainnya. Berikut adalah beberapa tujuan pencegahan:

1. Tujuan Pencegahan Kesehatan

- a) Mencegah penyakit menular; Tujuan pencegahan bisa menjadi mengurangi penyebaran penyakit menular, seperti influenza atau penyakit menular seksual, dengan mempromosikan vaksinasi, perilaku higienis, dan edukasi tentang cara penularan.
- b) Mencegah penyakit kronis; Tujuan pencegahan mungkin adalah mengurangi risiko penyakit kronis, seperti diabetes tipe 2 atau penyakit jantung, dengan mempromosikan gaya hidup sehat, pola makan yang baik, dan aktivitas fisik.
- c) Mencegah cedera; Tujuan pencegahan cedera bisa mencakup mengurangi insiden kecelakaan lalu lintas, cedera olahraga, atau kecelakaan di tempat kerja melalui kampanye kesadaran dan langkah-langkah keselamatan.

2. Tujuan Pencegahan Lingkungan

- a) Mencegah polusi; Tujuan pencegahan di bidang lingkungan bisa mencakup mengurangi polusi udara, air, atau tanah untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia.
- b) Mencegah kerusakan alam; Tujuan pencegahan bisa berarti melindungi ekosistem alam, seperti hutan dan lahan basah, dari kerusakan akibat aktivitas manusia.

3. Tujuan Pencegahan Sosial

- a) Mencegah kejahatan; Tujuan pencegahan kejahatan mungkin adalah mengurangi angka kejahatan melalui tindakan seperti pemberian pendidikan kepada anak-anak, pembentukan kegiatan positif di

komunitas, dan memperbaiki lingkungan fisik yang mendorong kejahatan.

- b) Mencegah masalah sosial; Tujuan pencegahan bisa berarti mengatasi masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, atau masalah narkoba melalui program-program rehabilitasi, bantuan sosial, dan pelatihan keterampilan.

2.3 Konsep Pelecehan Seksual

2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Johnson, Widnall, & Benya (2018) pelecehan seksual terdapat tiga unsur. Pertama, pemaksaan seksual. Kedua, perhatian terhadap sesuatu hal yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh lawan bicara. Ketiga, merendahkan atau melecehkan gender lain.

1. Pemaksaan Seksual; Ini mencakup tindakan atau upaya untuk memaksa atau memaksa seseorang terlibat dalam aktivitas seksual atau perilaku yang bersifat seksual tanpa persetujuan atau dengan adanya tekanan, ancaman, atau kekerasan. Pemaksaan seksual dapat mencakup pemerkosaan, pencabulan, atau tindakan seksual paksa lainnya.
2. Perhatian Seksual yang Tidak Diinginkan; Ini merujuk pada situasi di mana seseorang menerima perhatian atau komentar seksual yang tidak diinginkan dan merasa tidak nyaman dengan itu. Ini bisa mencakup komentar atau lelucon yang merendahkan atau bersifat seksual, atau perilaku lain yang membuat lawan bicara tidak nyaman.
3. Merendahkan atau Melecehkan Gender Lain; Ini mencakup perilaku atau komentar yang merendahkan atau melecehkan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka. Ini bisa termasuk komentar seksis, stereotip gender yang merendahkan, atau tindakan yang menunjukkan sikap meremehkan terhadap gender tertentu.

Ketiga unsur ini mencerminkan berbagai aspek dari pelecehan seksual yang dapat melibatkan tindakan fisik, komunikasi verbal, atau perilaku non-verbal yang merugikan dan merendahkan korban. Penting untuk mengakui pentingnya

menghindari, mengenali, dan melawan bentuk pelecehan seksual ini demi menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak setiap individu.

Pelecehan seksual merujuk perilaku yang tidak diinginkan dan tidak pantas yang berhubungan dengan seksualitas dan merugikan, merendahkan, atau merugikan korban secara fisik, emosional, atau psikologis. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks, dan sering melibatkan penggunaan kekuatan, intimidasi, atau manipulasi oleh pelaku. Beberapa bentuk pelecehan seksual meliputi:

1. Pelecehan Verbal; Termasuk komentar atau lelucon merendahkan yang berkaitan dengan seksualitas, ejekan, atau kata-kata kasar yang tidak pantas.
2. Pelecehan Non-verbal; Melibatkan gestur atau tindakan fisik yang memiliki konotasi seksual atau merendahkan, seperti mengedipkan mata, mencolek, atau gerakan tubuh yang tidak pantas.
3. Pelecehan Fisik; Termasuk sentuhan fisik yang tidak diinginkan dan merendahkan, seperti mengusap-usap atau meraba bagian tubuh tertentu tanpa izin.
4. Pelecehan Online; Melibatkan penggunaan teknologi dan internet untuk mengirim pesan atau materi seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan, seperti gambar telanjang atau pesan merendahkan.
5. Pelecehan Seksual di Tempat Kerja; Melibatkan perilaku yang tidak pantas atau seksual di lingkungan kerja, seperti komentar merendahkan atau tindakan fisik yang tidak pantas oleh rekan kerja atau atasan.
6. Pelecehan Seksual pada Anak; Merupakan bentuk pelecehan yang paling serius dan merusak, melibatkan tindakan seksual yang ditujukan kepada anak di bawah umur.

Pelecehan seksual dapat memiliki dampak yang serius pada korban, termasuk dampak emosional, psikologis, dan fisik. Dalam banyak kasus, korban pelecehan seksual merasa malu, marah, takut, dan bahkan merasa bersalah, meskipun sebenarnya mereka adalah korban. Pencegahan pelecehan seksual melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran, mengajarkan anak-

anak dan individu tentang batasan pribadi, serta menegakkan hukum untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual

Menurut Anonim (2011) faktor yang mempengaruhi pelecehan adalah merujuk pada berbagai elemen, situasi, atau kondisi yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya atau meningkatnya insiden pelecehan seksual. Ini termasuk faktor-faktor individu, sosial, budaya, lingkungan, dan struktural yang dapat memengaruhi persepsi, perilaku, dan dinamika terkait pelecehan seksual. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual:

1. Faktor Individu

- a) Sikap Terhadap Gender; Pandangan yang merendahkan terhadap jenis kelamin atau gender tertentu dapat memengaruhi perilaku pelecehan seksual.
- b) Gangguan Mental dan Psikologis; Gangguan seperti gangguan kepribadian, impuls kontrol, atau antisosial dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mengontrol dorongan seksual dan perilaku yang tidak pantas.
- c) Pendidikan dan Kesadaran; Tingkat pendidikan dan tingkat kesadaran terhadap konsep batasan pribadi dan seksualitas yang sehat juga dapat memainkan peran penting dalam mencegah pelecehan seksual.

2. Faktor Sosial dan Budaya

- a) Norma Sosial; Budaya atau norma sosial yang memungkinkan atau bahkan membenarkan perilaku pelecehan seksual dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan individu.
- b) Ketidaksetaraan Gender; Ketidaksetaraan gender dan kekuasaan yang mendasar bisa menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak memiliki lebih banyak kekuasaan atau kontrol.

- c) Budaya Perkosaan; Beberapa budaya memiliki pandangan yang kurang sensitif terhadap persetujuan dalam hubungan seksual, yang dapat menyebabkan pelecehan seksual lebih sering terjadi.
3. Faktor Lingkungan dan Situasional
- a) Konteks Sosial dan Fisik; Lingkungan fisik dan sosial di mana individu berinteraksi dapat mempengaruhi apakah pelecehan seksual mungkin terjadi, seperti lingkungan yang memungkinkan isolasi atau kurangnya pengawasan.
 - b) Keterbatasan Akses; Faktor seperti alkohol atau narkoba dapat mengurangi pengendalian diri individu dan meningkatkan risiko perilaku pelecehan seksual.
4. Faktor Ekonomi
- Kemiskinan; Kondisi ekonomi yang sulit dapat memengaruhi dinamika kekerasan dan pelecehan dalam hubungan atau lingkungan tertentu.
5. Faktor Media dan Teknologi
- a) Pengaruh Media; Representasi seksual yang merendahkan dalam media dapat memengaruhi pandangan individu tentang seksualitas dan batasan pribadi.
 - b) Pelecehan Online; Teknologi dan media sosial dapat memfasilitasi pelecehan seksual dalam bentuk perundungan atau penyampaian konten seksual yang tidak diinginkan.

2.3.3 Dampak Pelecehan Seksual

Menurut Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) (2020) RAINN adalah organisasi anti-pelecehan seksual di Amerika Serikat. Mereka mencatat bahwa dampak pelecehan seksual pada korban meliputi trauma fisik, luka, kondisi medis, trauma psikologis yang serius, gangguan tidur, gangguan makan, dan risiko kecanduan narkoba atau alkohol. Sedangkan menurut U.S. Department of Health and Human Services (2021) Dalam panduan "*Effects of Sexual Harassment and Assault*," Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia Amerika Serikat menguraikan dampak pelecehan seksual, termasuk

gangguan tidur, depresi, kecemasan, gangguan makan, penurunan harga diri, dan masalah hubungan. Menurut Caroline Dinéage (2017) Menteri Negara untuk Kesejahteraan, menyebut dampak pelecehan seksual sebagai "merusak" dalam pidato di Parlemen Inggris. Dia menyoroti bahwa dampaknya bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional korban, mengganggu hubungan, dan menghambat perkembangan individu.

Berdasarkan pandangan dari beberapa sumber tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pelecehan seksual memiliki dampak yang serius dan luas terhadap korban. Dampak tersebut mencakup:

1. Dampak Fisik dan Kesehatan; Pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma fisik, luka, dan kondisi medis akibat tindakan kekerasan. Selain itu, korban juga dapat mengalami gangguan tidur dan gangguan makan, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara keseluruhan.
2. Dampak Psikologis; Korban pelecehan seksual cenderung mengalami trauma psikologis yang serius. Ini dapat berupa depresi, kecemasan, dan penurunan harga diri. Trauma ini juga dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional korban.
3. Dampak Sosial dan Hubungan; Pelecehan seksual bisa mengganggu hubungan sosial korban, termasuk masalah dalam menjalin hubungan interpersonal. Dampak ini bisa mencakup isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun dan memelihara hubungan yang sehat.
4. Dampak Pengembangan Individu; Pelecehan seksual dapat menghambat perkembangan individu secara holistik. Dampak tersebut termasuk potensi penghambatan dalam mencapai potensi penuh mereka karena trauma dan masalah yang muncul akibat pelecehan.

Kesimpulannya, pelecehan seksual memiliki dampak yang meliputi aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan perkembangan individu. Dampak-dampak ini dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang, dan sering kali memerlukan dukungan, pemulihan, dan pengobatan yang spesifik untuk membantu korban

mengatasi akibat traumatis dari pelecehan seksual. Upaya pencegahan, edukasi, dan dukungan terhadap korban menjadi penting dalam mengatasi masalah ini.

2.3.4 Indikator Pelecehan Seksual

Indikator pelecehan seksual adalah tanda-tanda atau perilaku yang dapat mengindikasikan adanya kasus pelecehan seksual. Indikator ini bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks, usia korban, dan hubungan antara korban dan pelaku.

Menurut *National Center for Victims of Crime* (2018) menyebutkan beberapa indikator pelecehan seksual pada anak-anak, termasuk perubahan perilaku tiba-tiba, ketakutan atau kecemasan terhadap orang tertentu, perilaku seksual yang tidak sesuai usia, dan reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar. Berikut adalah beberapa indikator pelecehan seksual pada anak-anak beserta penjelasan singkat tentang masing-masing indikator:

1. Perubahan Perilaku Tiba-tiba; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin mengalami perubahan tiba-tiba dalam perilaku mereka. Mereka bisa menjadi lebih tertutup, sensitif, atau agresif secara tiba-tiba.
2. Ketakutan atau Kecemasan Terhadap Orang Tertentu; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa takut atau cemas saat berada di dekat orang tertentu, terutama jika pelaku adalah orang tersebut.
3. Perilaku Seksual yang Tidak Sesuai Usia; Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin menunjukkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ini bisa termasuk berbicara atau bertingkah laku dengan cara yang berlebihan seksual atau menggunakan bahasa yang tidak pantas untuk usia mereka.
4. Reaksi Fisik atau Emosional yang Tidak Wajar; Anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin menunjukkan reaksi fisik atau emosional yang tidak wajar terhadap situasi atau topik tertentu. Misalnya, mereka mungkin merasa marah, bingung, atau menunjukkan perubahan dalam pola tidur dan makan.

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

2.4.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

2.4.2 Tabel penelitian terdahulu

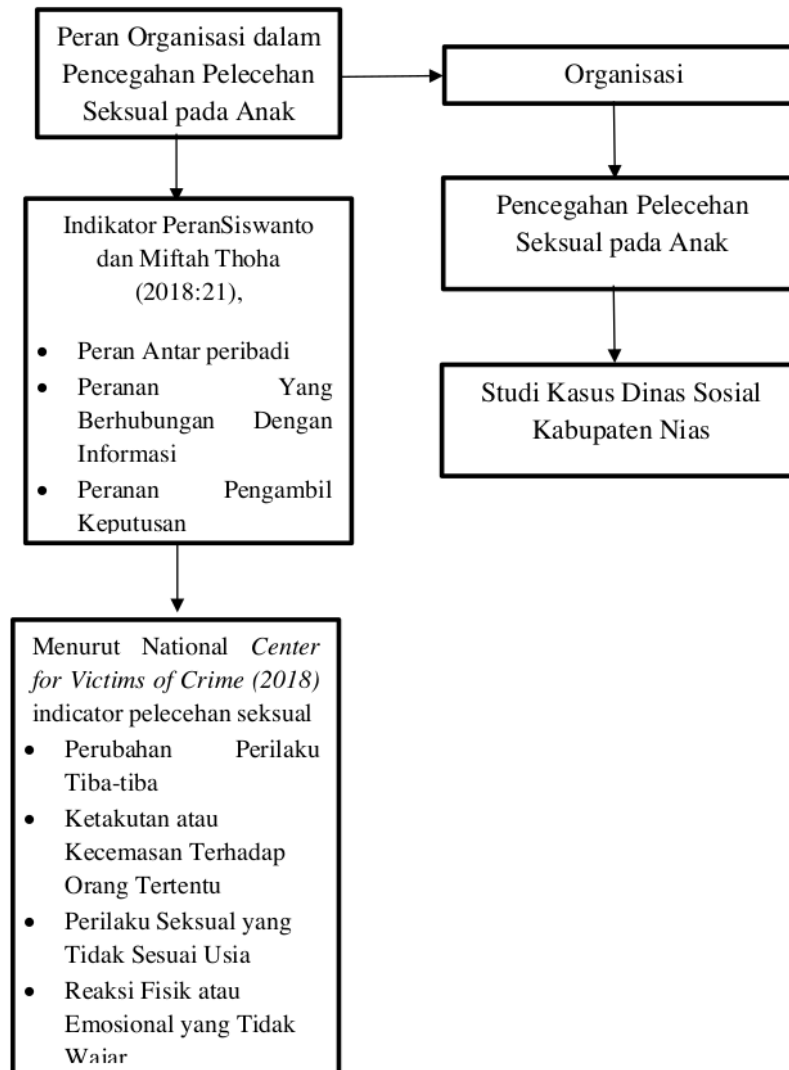
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------------|--|------------------|---|
| 1 | Ahmad Santoso | Peran Organisasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak: Kasus Dinas Sosial Kabupaten Nias | 2015 | Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nias telah mengimplementasikan program-program pencegahan pelecehan seksual yang melibatkan kolaborasi dengan sekolah-sekolah dan komunitas setempat. |
| 2 | Maria Indah Wardani | Implementasi Kebijakan Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak di Lingkungan Organisasi Sosial | 2018 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Nias masih perlu perbaikan dalam |

| | | | | |
|---|-----------------|---|------|---|
| | | | | hal pelatihan, pengawasan, dan edukasi kepada staf serta kolaborasi dengan organisasi lain. |
| 3 | Budi Prasetyo | Efektivitas Program Pendidikan Seksual dalam Mencegah Pelecehan Seksual pada Anak | 2020 | Penelitian ini menemukan bahwa program pendidikan seksual yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias telah membantu meningkatkan kesadaran anak-anak tentang batasan pribadi dan tindakan yang dapat diambil jika menghadapi pelecehan seksual. |
| 4 | Anita S. Kusuma | Evaluasi Program Pencegahan Pelecehan Seksual Anak oleh Organisasi Nirlaba | 2020 | Program pencegahan pelecehan seksual anak oleh organisasi nirlaba terbukti efektif dan bermanfaat. |
| 5 | Rina M. Halim | Persepsi Orang Tua terhadap Peran Dinas Sosial dalam Pencegahan | 2021 | Orang tua menganggap peran Dinas Sosial penting dalam melindungi |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|------------------------------|
| | | Pelecehan Seksual Anak | | anak dari pelecehan seksual. |
|--|--|------------------------|--|------------------------------|

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95) Kerangka berfikir yang tepat dan baik mampu menjabarkan dengan teori pertautan antara variabel yang nantinya diteliti.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2019:11)

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014), definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang cara mengukur atau mengamati variabel penelitian secara konkrit dan jelas, sehingga dapat dipahami oleh peneliti dan orang lain yang membaca hasil penelitian. Definisi operasional ini berisi deskripsi yang terperinci tentang variabel yang akan diukur atau diamati, serta teknik dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Variabel Independen

Peran Organisasi; Ini mencakup bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Nias terlibat dalam pencegahan pelecehan seksual pada anak. Variabel ini mungkin

mencakup aspek seperti kebijakan, program, sumber daya manusia, dan langkah-langkah yang diambil oleh organisasi.

2. Variabel Dependen

Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak; Ini adalah variabel yang ingin diukur dampaknya. Bagaimana efektivitas peran organisasi dalam mencegah pelecehan seksual pada anak di wilayah Kabupaten Nias.

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.3.1 Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias Jln. Pertanian, Desa Hiliweto Gido, Kabupaten Gido.

3.3.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias.

| No | Uraian Kegiatan | Tahun 2023 | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|-------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|---|
| | | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | |
| 1. | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan Proposal | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 3. | Seminar Proposal | | | | | | | ■ | | | |
| 4. | Penelitian | | | | | | | ■ | | | |
| 5. | Pengolahan Data | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 6. | Ujian Sikripsi | | | | | | | | | | ■ |

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi

serta dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam suatu penelitian tidak pernah luput dari adanya *informan*, pemilihan *informan* menjadi suatu yang sangat penting dalam memberikan informasi mengenai objek yang diteliti dan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Peneliti melakukan penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau dikenal juga dengan sampling pertimbangan (Arikunto 2010:137) mendefinisikan *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam *purposive sampling*, memilih subjek atau unit sampel yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dan representatif terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih subjek atau unit sampel, seperti karakteristik khusus, posisi sosial, pengalaman, atau pengetahuan.

Adapun informan penelitian yang terpilih adalah orang – orang yang terlibat dalam Penelitian:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias
2. Kepala Bidang
3. Kasubbag dan,
4. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Nias

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi; Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung atau tidak langsung perilaku, kegiatan, dan interaksi di lingkungan organisasi. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat kegiatan yang terjadi pada saat wawancara atau dengan mengamati rekaman video atau audio.

2. Wawancara: Metode ini dilakukan dengan mewawancarai *informant key* yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon atau video call. Peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk memastikan bahwa topik penelitian yang relevan dapat ditanyakan dengan konsisten kepada setiap informan.

3.7 Teknik Analisa Data

Sebagaimana umumnya dalam penelitian kualitatif, proses analisis data berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah masa pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan hasil penelitian. Model analisis dalam penelitian kualitatif ini disebut sebagai model interaktif, seperti yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (2002: 34). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yang meliputi hal-hal berikut ini:

1. Pengumpulan Data; yaitu pencarian data-data yang diperlukan sesuai dengan kondisi di tempat penelitian. Data-data yang dikumpulkan oleh penulis berupa laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan dokumen lain yang mendukung penelitian.
2. Reduksi data; Data yang diperoleh dari lokasi penelitian akan segera dianalisis melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan cara demikian maka kesimpulan dapat ditarik oleh peneliti
3. Penyajian data; yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis (yaitu matriks, grafik dan bagan), yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus

melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

4. Menarik kesimpulan; Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nias

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias atau disingkat Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias merupakan salah satu Instansi Tipe A yang ada di Kabupaten Nias. Sebelumnya dinas ini bernama Dinas Sosial Kabupaten Nias, kemudian mengalami perubahan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat desa, perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Nias (sebagaimana tertuang pada Lampiran IX, Peraturan Bupati Nias Nomor 67 Tahun 2021).

4.1.2 Visi Misi

1. Visi

Kabupaten Nias Maju

1. Misi

1) Misi (Trisakti Nias Maju)

a) Desa terakses, ibukota terurus;

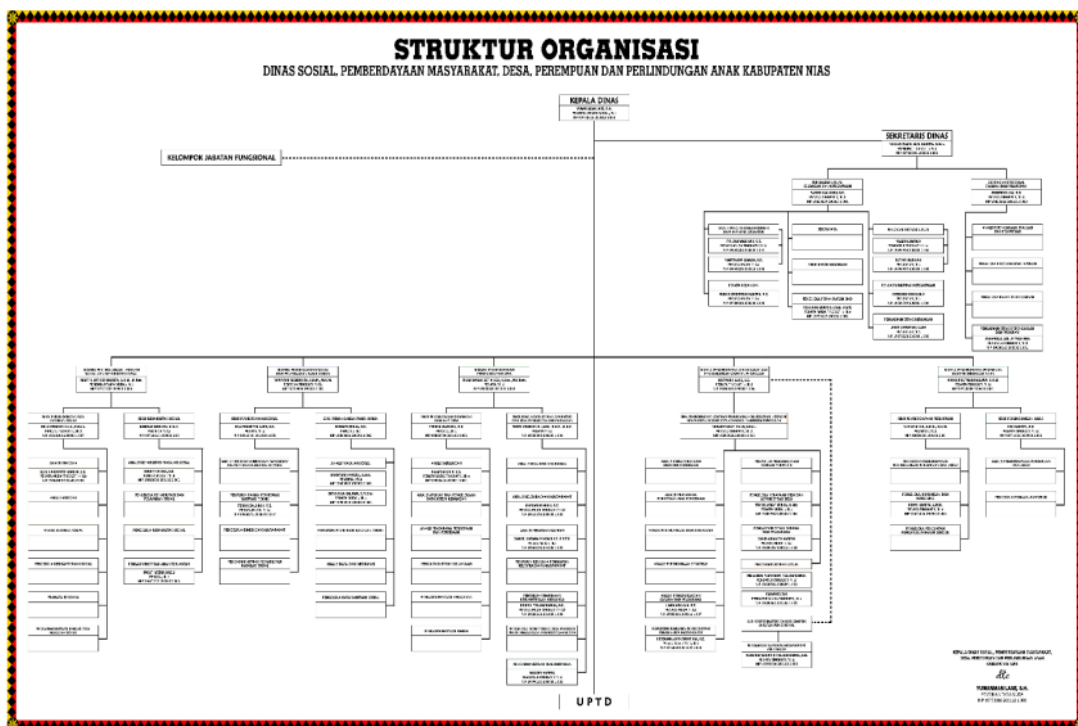
- b) Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak; dan
 - c) Petani, peternak dan nelayan produktif.
- 2) Strategi Mewujudkan Misi
- a) Inkronisasi pembangunan desa dengan program pembangunan Kabupaten Nias
 - b) Pengutamakan cost-benefit setiap program pembangunan; dan
 - c) Manajemen SDM pemerintahan yang berbasis kinerja.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perangkat Daerah



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS



Sember : Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias

4.1.4 Deskripsi Informan (*key Informant*)

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan (*key Informant*) untuk diteliti, maka yang menjadi informan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Informan (*Key Informan*)

| No | Nama | Jabatan |
|----|--|---|
| 1 | Yulius irama Jaya Harefa, S.Sos Pembina Tingkat I IV/b Nip 19770318 200112 1 003 | Sekretaris Dinas, SPMDP2A |
| 2 | Arosupratman Halawa, S.K.M Penata Tingkat I /III/d Nip 19720105 199603 1 001 | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2A) |
| 3 | Dwi Hartini, S.E Penata Tingkat I/III/d Nip 19741023 200903 2 003 | Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pembedardayaan P2A |

Sember olahan peneliti 2023

Penelitian melakukan wawancara kepada 3 orang informan (*key informant*) pada Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Nias

4.2 Hasil Penelitian

1. Bagaimana pendekatan antar pribadi di dalam organisasi ini mempengaruhi upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yulius irama Jaya Harefa, S.Sos sebagai Sekretaris Dinas, SPMDP2A, Arosupratman Halawa, S.K.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2A) dan kepada Dwi Hartini, S.E sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pembedardayaan P2A. pada hari Senin tanggal 28 September 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Nias, peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas, SPMDP2A, informan 1 menyatakan bahwa:

“Pendekatan antar pribadi di dalam organisasi sangat penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Budaya kerja yang mempromosikan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencegah pelecehan seksual. Ketika hubungan antar pribadi di organisasi didasarkan pada saling menghormati, kepercayaan, dan kesadaran akan hak asasi manusia, karyawan lebih mungkin untuk mengenali tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponsnya dengan tepat. Kesadaran akan pentingnya memberikan ruang aman bagi anak-anak untuk berbicara juga menjadi bagian penting dari pendekatan antar pribadi ini. Komitmen kolektif untuk melindungi anak-anak dan memastikan bahwa mereka merasa didukung dan dilindungi oleh seluruh komunitas organisasi adalah kunci dalam mencegah pelecehan seksual”

Dari informan 1 menegaskan bahwa budaya kerja yang mempromosikan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan perlunya melindungi anak-anak dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mencegah pelecehan seksual. Pentingnya hubungan antar pribadi yang didasarkan pada saling menghormati, kepercayaan, dan kesadaran akan hak asasi manusia menjadi titik kunci. Ketika pegawai merasakan adanya lingkungan yang mengutamakan prinsip-prinsip tersebut, mereka lebih mengenali tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan bertindak secara tepat sebagai respons. Kesadaran akan pentingnya memberikan ruang yang aman bagi anak-anak untuk berbicara juga menjadi aspek krusial dalam pendekatan antar pribadi ini. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Pendekatan antar pribadi di dalam organisasi memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Keterbukaan komunikasi yang kuat antara anggota organisasi dapat memungkinkan identifikasi dan pelaporan perilaku yang mencurigakan atau kasus pelecehan. Budaya yang mempromosikan saling percaya dan dukungan dapat membantu individu merasa aman untuk melaporkan kejadian yang tidak pantas. Selain itu, peran pemimpin yang membangun

lingkungan yang inklusif, mendukung, dan melindungi anak-anak juga sangat penting. Pelatihan terkait etika, kepedulian terhadap anak, serta kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten juga membantu mendorong kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan organisasi”

Informan tersebut menjelaskan bahwa pendekatan interpersonal di dalam sebuah organisasi sangat penting dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Komunikasi yang terbuka dan kuat antar anggota organisasi memungkinkan identifikasi dan pelaporan perilaku mencurigakan atau kasus pelecehan. Budaya yang mempromosikan saling percaya dan dukungan juga membantu individu merasa aman untuk melaporkan kejadian yang tidak pantas. Selain itu, peran pemimpin dalam membangun lingkungan yang inklusif, mendukung, dan melindungi anak-anak sangat penting. Pelatihan terkait etika, kepedulian terhadap anak, serta penerapan kebijakan yang jelas dan konsisten juga membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan organisasi. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Dwi Hartini, S.E informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Pendekatan antar pribadi di dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Budaya komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap individu dapat menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa nyaman untuk melaporkan situasi yang mencurigakan atau tidak aman. Ketika staf dan anggota organisasi saling menghormati satu sama lain, ini menciptakan kesadaran akan pentingnya menghormati dan melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan. Selain itu, ketika ada hubungan antar pribadi yang kuat dan saling mendukung di dalam organisasi, orang-orang cenderung lebih peduli terhadap keamanan dan kesejahteraan anak-anak, serta lebih waspada terhadap tanda-tanda pelecehan seksual yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pendekatan antar pribadi yang positif dan terbuka di dalam organisasi dapat menjadi faktor penting dalam mencegah pelecehan seksual pada anak”

Informan tersebut menegaskan bahwa pendekatan interpersonal di dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah

pelecehan seksual pada anak. Budaya komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap individu menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa nyaman melaporkan situasi yang mencurigakan atau tidak aman. Ketika staf dan anggota organisasi saling menghormati satu sama lain, kesadaran akan pentingnya menghormati serta melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan terbentuk. Selain itu, hubungan antar pribadi yang kuat dan saling mendukung di dalam organisasi mendorong kepedulian terhadap keamanan dan kesejahteraan anak-anak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda-tanda pelecehan seksual yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pendekatan antar pribadi yang positif dan terbuka di dalam organisasi menjadi faktor penting dalam mencegah pelecehan seksual pada anak.

1. Apa langkah konkret yang diambil untuk memastikan hubungan interpersonal yang sehat dan mendukung di lingkungan tempat kerja atau program yang dilaksanakan?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yulius Irama Jaya Harefa, S.Sos sebagai Sekretaris Dinas, SPMDP2A, Arosupratman Halawa, S.K.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2A) dan kepada Dwi Hartini, S.E sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan P2A. pada hari Senin tanggal 28 September 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas, SPMDP2A, informan 1 menyatakan bahwa:

“Pertama, pendidikan dan pelatihan yang teratur diberikan kepada semua anggota organisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesional, batasan yang tepat dalam hubungan interpersonal, serta tanda-tanda pelecehan seksual, didirikan kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan pelecehan seksual. Kebijakan ini harus ditegakkan secara konsisten dan disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi. Ketiga, menciptakan budaya terbuka di mana orang merasa nyaman untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas atau situasi yang mencurigakan tanpa takut akan konsekuensi negatif. Keempat, mempromosikan komunikasi yang terbuka dan transparan di antara anggota organisasi, baik melalui pertemuan reguler, forum diskusi, atau sarana komunikasi

lainnya. Kelima, memfasilitasi pengembangan hubungan yang positif antara anggota organisasi melalui kegiatan sosial, pengakuan atas pencapaian, serta dukungan dan kolaborasi dalam proyek-proyek kerja. Keenam, memberikan akses dan sumber daya yang memadai untuk konseling atau bantuan bagi anggota organisasi yang membutuhkan dukungan dalam mengelola hubungan interpersonal yang kompleks atau dalam menghadapi situasi yang menantang”

Informan tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang sangat penting untuk mencegah pelecehan seksual pada anak di lingkungan organisasi: Pertama, pendidikan dan pelatihan teratur diberikan kepada semua anggota organisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesional, batasan dalam hubungan interpersonal, dan tanda-tanda pelecehan seksual. Selain itu, kebijakan yang jelas terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan pelecehan seksual didirikan, yang harus ditegakkan secara konsisten dan disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi. Kedua, menciptakan budaya terbuka di mana orang merasa nyaman melaporkan perilaku yang tidak pantas atau situasi yang mencurigakan tanpa takut akan konsekuensi negatif. Ketiga, mempromosikan komunikasi yang terbuka dan transparan di antara anggota organisasi melalui berbagai sarana, seperti pertemuan reguler, forum diskusi, atau media komunikasi lainnya. Keempat, memfasilitasi pengembangan hubungan yang positif antara anggota organisasi melalui kegiatan sosial, pengakuan atas pencapaian, serta dukungan dan kolaborasi dalam proyek-proyek kerja. Kelima, memberikan akses dan sumber daya yang memadai untuk konseling atau bantuan kepada anggota organisasi yang membutuhkan dukungan dalam mengelola hubungan interpersonal yang kompleks atau menghadapi situasi yang menantang. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Organisasi dapat mengambil langkah-langkah konkret dengan memulai dari pembangunan budaya kerja yang inklusif dan aman. Hal

ini melibatkan penyusunan kebijakan yang jelas terkait dengan etika hubungan antarpribadi di tempat kerja, dengan fokus pada menjaga profesionalisme dan menghormati batasan pribadi. Selanjutnya, pendekatan aktif dalam memberikan pelatihan kepada staf dan anggota organisasi tentang pengenalan tanda-tanda pelecehan seksual serta cara untuk merespons dan melaporkan situasi yang mencurigakan. Penting juga untuk memfasilitasi saluran komunikasi yang terbuka dan aman bagi anggota organisasi agar mereka merasa nyaman dalam berbagi permasalahan atau kekhawatiran terkait hubungan antarpribadi di lingkungan kerja. Dukungan psikologis dan sumber daya yang tersedia juga menjadi hal penting untuk membantu individu mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam hubungan interpersonal. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil, serta mengadakan forum atau sesi refleksi untuk terus meningkatkan budaya kerja yang mendukung dan memastikan lingkungan yang aman bagi semua anggota organisasi”

Informan tersebut memberikan dukungan atas langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menekankan beberapa poin penting. Pertama, penting bagi organisasi untuk memulai dengan pembangunan budaya kerja yang inklusif dan aman. Ini mencakup penyusunan kebijakan yang jelas terkait dengan etika hubungan antarpribadi di tempat kerja, fokus pada menjaga profesionalisme, dan menghormati batasan pribadi. Kemudian, pendekatan aktif dalam memberikan pelatihan kepada staf dan anggota organisasi tentang pengenalan tanda-tanda pelecehan seksual serta cara untuk merespons dan melaporkan situasi yang mencurigakan menjadi esensial. Saluran komunikasi yang terbuka dan aman harus difasilitasi agar anggota organisasi merasa nyaman dalam berbagi permasalahan atau kekhawatiran terkait hubungan antarpribadi di lingkungan kerja. Dukungan psikologis dan sumber daya yang tersedia juga menjadi hal penting untuk membantu individu mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam hubungan interpersonal. Terakhir, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil sangat diperlukan, bersama dengan forum atau sesi refleksi, untuk terus meningkatkan budaya kerja yang mendukung dan memastikan lingkungan yang aman bagi semua anggota organisasi. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September

2023, peneliti bertanya kepada Dwi Hartini, S.E informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Membangun kebijakan yang jelas, memberikan pelatihan mengenai tanda-tanda pelecehan, memfasilitasi komunikasi terbuka, menyediakan sumber daya dukungan, dan melakukan evaluasi berkala”

Informan tersebut memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dengan merangkumnya secara singkat dan jelas. Langkah pertama adalah membangun kebijakan yang jelas terkait dengan pencegahan pelecehan seksual, yang diikuti oleh memberikan pelatihan mengenai tanda-tanda pelecehan kepada anggota organisasi. Selanjutnya, pentingnya memfasilitasi komunikasi terbuka di dalam organisasi untuk memungkinkan orang merasa nyaman melaporkan masalah yang muncul terkait hubungan antarpribadi. Selain itu, menyediakan sumber daya dukungan seperti konseling atau bantuan lainnya menjadi bagian penting dalam membantu individu mengatasi masalah dalam hubungan interpersonal. Terakhir, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian langkah pencegahan yang diimplementasikan.

2. Peran yang Berhubungan dengan Informasi (Informational Role)

Bagaimana organisasi Anda memastikan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual tersebar luas di masyarakat dan di lingkungan internal organisasi?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yulius irama Jaya Harefa, S.Sos sebagai Sekretaris Dinas, SPMDP2A, Arosupratman Halawa, S.K.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2A) dan kepada Dwi Hartini, S.E sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan P2A. pada hari Senin tanggal 28 September 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas, SPMDP2A, informan 1 menyatakan bahwa:

“Organisasi kami memastikan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual tersebar luas dengan berbagai cara. Kami mengadakan kampanye publik melalui media sosial, situs web, dan saluran komunikasi daring lainnya untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya perlindungan anak dan langkah-langkah pencegahan pelecehan seksual. Di lingkungan internal, kami menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan pertemuan rutin yang difokuskan pada edukasi mengenai tanda-tanda pelecehan seksual, prosedur pelaporan, dan bagaimana mendukung korban pelecehan. Selain itu, kami menciptakan materi informasi yang mudah diakses oleh staf melalui intranet atau platform internal kami. Kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait, seperti sekolah, lembaga perlindungan anak, atau komunitas lokal, juga menjadi bagian penting dalam memastikan informasi pencegahan pelecehan seksual tersedia secara luas. Melalui kolaborasi ini, kami memperluas jangkauan pesan pencegahan dan memperkuat jejaring dukungan untuk melindungi anak-anak dari risiko pelecehan seksual”

Informan tersebut menjelaskan beragam langkah yang dilakukan organisasi untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual. Secara eksternal, mereka melakukan kampanye publik melalui media sosial, situs web, dan saluran komunikasi daring lainnya untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya perlindungan anak dan langkah-langkah pencegahan pelecehan seksual kepada masyarakat luas. Di lingkungan internal, organisasi menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pertemuan rutin yang berfokus pada edukasi mengenai tanda-tanda pelecehan seksual, prosedur pelaporan, serta bagaimana mendukung korban pelecehan. Mereka juga menciptakan materi informasi yang mudah diakses oleh staf melalui intranet atau platform internal. Selain itu, kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait seperti sekolah, lembaga perlindungan anak, atau komunitas lokal dijalin untuk memastikan informasi pencegahan pelecehan seksual tersedia secara luas. Kolaborasi ini memperluas jangkauan pesan pencegahan dan memperkuat jejaring dukungan untuk melindungi anak-anak dari risiko pelecehan seksual. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Organisasi kami memastikan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual tersebar luas dengan strategi komunikasi yang beragam. Kami menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye daring untuk menjangkau masyarakat luas. Di dalam organisasi, informasi ini disampaikan melalui pelatihan reguler, seminar, dan materi edukatif yang diberikan kepada staf dan anggota. Selain itu, kami menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dan sekolah untuk menyebarkan informasi ini dalam komunitas secara lebih langsung melalui acara, workshop, dan kegiatan penyuluhan. Upaya kolaboratif dengan pemerintah, LSM, dan komunitas lokal juga menjadi bagian dari usaha kami untuk memastikan informasi pencegahan pelecehan seksual tersebar luas di semua lapisan masyarakat”

Informan tersebut memberikan dukungan atas langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menekankan beragam strategi yang digunakan organisasi untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual. Secara eksternal, mereka menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye daring untuk menjangkau masyarakat luas. Di dalam organisasi, informasi ini disampaikan melalui pelatihan reguler, seminar, dan materi edukatif yang diberikan kepada staf dan anggota. Selain itu, mereka menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dan sekolah untuk menyebarkan informasi ini secara langsung dalam komunitas melalui acara, workshop, dan kegiatan penyuluhan. Upaya kolaboratif dengan pemerintah, LSM, dan komunitas lokal juga menjadi bagian dari usaha mereka untuk memastikan informasi pencegahan pelecehan seksual tersebar luas di semua lapisan masyarakat. Ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam upaya menyebarkan informasi pencegahan kepada berbagai segmen masyarakat. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Dwi Hartini, S.E informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Organisasi kami memperluas informasi tentang pencegahan pelecehan seksual melalui berbagai saluran komunikasi. Kami aktif menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye daring untuk mencapai masyarakat. Di internal, kami menyelenggarakan sesi penyuluhan, workshop, dan pelatihan rutin yang melibatkan staf dan

anggota organisasi. Selain itu, kami mengadakan kerja sama dengan sekolah, lembaga terkait, dan komunitas lokal untuk menyebarkan pesan pencegahan ini melalui kegiatan bersama, seminar, dan kampanye informasi yang lebih terarah. Kerjasama dengan pemerintah dan LSM juga menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan penyebaran informasi yang luas tentang pencegahan pelecehan seksual”

Informan tersebut memberikan dukungan atas langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menegaskan langkah-langkah konkret yang dilakukan organisasi mereka untuk memperluas informasi tentang pencegahan pelecehan seksual. Secara eksternal, organisasi aktif menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye daring untuk mencapai masyarakat secara luas. Di internal, mereka menyelenggarakan sesi penyuluhan, workshop, dan pelatihan rutin yang melibatkan staf dan anggota organisasi untuk meningkatkan kesadaran. Selain itu, mereka menjalin kerja sama dengan sekolah, lembaga terkait, dan komunitas lokal untuk menyebarkan pesan pencegahan ini melalui kegiatan bersama, seminar, dan kampanye informasi yang lebih terarah. Kolaborasi dengan pemerintah dan LSM juga menjadi bagian dari upaya mereka untuk memastikan penyebaran informasi yang luas tentang pencegahan pelecehan seksual. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi dan kemitraan untuk menjangkau masyarakat secara holistik dalam upaya pencegahan pelecehan seksual.

3. Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mendiseminasi informasi yang akurat dan relevan kepada berbagai pihak terkait?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yulius irama Jaya Harefa, S.Sos sebagai Sekretaris Dinas, SPMDP2A, Arosupratman Halawa, S.K.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2A) dan kepada Dwi Hartini, S.E sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan P2A. pada hari Senin tanggal 28 September 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Nias, peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas, SPMDP2A, informan 1 menyatakan bahwa:

“Kami mengandalkan beberapa strategi untuk memastikan diseminasi informasi yang akurat dan relevan kepada pihak terkait. Pertama, kami melakukan penelitian yang cermat untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan didukung oleh data yang valid dan relevan dengan isu pelecehan seksual. Selanjutnya, kami menggunakan platform komunikasi yang sesuai dengan preferensi dan kebiasaan penerima informasi, seperti media sosial, surat elektronik, atau pertemuan langsung, untuk mencapai berbagai kelompok dengan pesan yang disesuaikan. Kolaborasi dengan ahli dan lembaga yang mengkhususkan diri dalam pencegahan pelecehan seksual juga membantu kami menyampaikan informasi yang lebih terperinci dan terfokus kepada pihak terkait. Terakhir, kami memperhatikan umpan balik yang diterima dari penerima informasi untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan strategi diseminasi kami agar lebih efektif”

Informan tersebut menjelaskan beberapa strategi yang digunakan oleh organisasi mereka untuk memastikan diseminasi informasi yang akurat dan relevan terkait dengan isu pelecehan seksual kepada pihak terkait. Pertama, mereka melakukan penelitian yang cermat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan didukung oleh data yang valid dan relevan dengan isu pelecehan seksual. Ini menunjukkan komitmen untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan beralaskan bukti. Selanjutnya, mereka menggunakan platform komunikasi yang sesuai dengan preferensi dan kebiasaan penerima informasi, seperti media sosial, surat elektronik, atau pertemuan langsung, dengan pesan yang disesuaikan untuk mencapai berbagai kelompok. Pendekatan yang personal dan beragam ini memungkinkan mereka menjangkau khalayak yang lebih luas. Kolaborasi dengan ahli dan lembaga yang memiliki spesialisasi dalam pencegahan pelecehan seksual juga membantu mereka menyampaikan informasi yang lebih terperinci dan terfokus kepada pihak terkait. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan pemahaman terkini dan berkualitas tinggi. Terakhir, pentingnya memperhatikan umpan balik yang diterima dari penerima informasi untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan strategi diseminasi menjadi bagian penting dari pendekatan mereka. Hal ini menunjukkan kesediaan untuk terus

berkembang dan meningkatkan efektivitas dalam menyebarkan pesan pencegahan pelecehan seksual. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Menerapkan beberapa strategi untuk menyebarkan informasi yang tepat dan relevan kepada pihak terkait. Salah satunya adalah menyusun materi komunikasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan setiap kelompok, seperti orangtua, anak-anak, guru, atau staf organisasi. Kami juga melakukan penyesuaian bahasa dan pendekatan komunikasi sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok sasaran, agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif. Selain itu, kami memanfaatkan platform digital yang berbeda, seperti webinar, video edukatif, infografis, atau panduan online, agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Upaya kolaborasi dengan ahli, organisasi terkait, dan advokat juga membantu kami dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada berbagai pihak terkait”

Informan tersebut menjelaskan beberapa strategi yang digunakan oleh organisasi mereka untuk memastikan diseminasi informasi yang akurat dan relevan terkait dengan isu pelecehan seksual kepada pihak terkait. Pertama, mereka melakukan penelitian yang cermat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan didukung oleh data yang valid dan relevan dengan isu pelecehan seksual. Ini menunjukkan komitmen untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan beralaskan bukti. Selanjutnya, mereka menggunakan platform komunikasi yang sesuai dengan preferensi dan kebiasaan penerima informasi, seperti media sosial, surat elektronik, atau pertemuan langsung, dengan pesan yang disesuaikan untuk mencapai berbagai kelompok. Pendekatan yang personal dan beragam ini memungkinkan mereka menjangkau khalayak yang lebih luas. Kolaborasi dengan ahli dan lembaga yang memiliki spesialisasi dalam pencegahan pelecehan seksual juga membantu mereka menyampaikan informasi yang lebih terperinci dan terfokus kepada pihak terkait. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan pemahaman terkini dan berkualitas tinggi. Terakhir, pentingnya

memperhatikan umpan balik yang diterima dari penerima informasi untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan strategi diseminasi menjadi bagian penting dari pendekatan mereka. Hal ini menunjukkan kesediaan untuk terus berkembang dan meningkatkan efektivitas dalam menyebarkan pesan pencegahan pelecehan seksual. peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“menerapkan beberapa strategi untuk menyebarkan informasi yang tepat dan relevan kepada pihak terkait. Salah satunya adalah menyusun materi komunikasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan setiap kelompok, seperti orangtua, anak-anak, guru, atau staf organisasi. Kami juga melakukan penyesuaian bahasa dan pendekatan komunikasi sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok sasaran, agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif. Selain itu, kami memanfaatkan platform digital yang berbeda, seperti webinar, video edukatif, infografis, atau panduan online, agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Upaya kolaborasi dengan ahli, organisasi terkait, dan advokat juga membantu kami dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada berbagai pihak terkait”

Informan tersebut memberikan dukungan atas strategi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan menegaskan beberapa metode yang mereka terapkan untuk menyebarkan informasi yang tepat dan relevan kepada pihak terkait. Mereka menyusun materi komunikasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan setiap kelompok sasaran, seperti orangtua, anak-anak, guru, atau staf organisasi. Penyesuaian bahasa dan pendekatan komunikasi juga dilakukan agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif kepada masing-masing kelompok. Selain itu, mereka memanfaatkan berbagai platform digital seperti webinar, video edukatif, infografis, atau panduan online agar informasi yang mereka

sampaikan dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Dengan menggunakan berbagai media ini, mereka berupaya mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Kolaborasi dengan ahli, organisasi terkait, dan advokat menjadi bagian penting dalam upaya mereka menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada berbagai pihak terkait. Kerjasama ini memperkuat keakuratan dan relevansi informasi yang disampaikan, menegaskan komitmen untuk menyebarkan pesan yang sesuai dengan pemahaman terkini dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Strategi untuk memastikan diseminasi informasi yang tepat dan relevan kepada berbagai pihak terkait. Pertama, kami melakukan peninjauan rutin terhadap materi dan informasi yang kami bagikan, memastikan bahwa mereka selalu diperbarui dengan data terbaru dan relevan. Kedua, kami menggunakan platform komunikasi yang berbeda sesuai dengan preferensi penerima informasi, seperti email, media sosial, situs web, dan surat kabar lokal. Ketiga, kami bekerja sama dengan para ahli dan lembaga yang terkait untuk memvalidasi informasi sebelum disebarkan, sehingga kami dapat menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Keempat, kami melibatkan audiens kami dalam proses komunikasi dengan mengadakan sesi tanya jawab, diskusi daring, atau seminar yang memungkinkan pertukaran informasi dua arah. Terakhir, kami menggunakan data analisis untuk memahami lebih baik respons dan tanggapan masyarakat terhadap informasi yang kami bagikan, sehingga kami dapat terus meningkatkan strategi diseminasi kami. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Dwi Hartini, S.E informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

4. Bagaimana keputusan diambil dalam kasus-kasus yang terkait dengan dugaan pelecehan seksual terhadap anak?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yulius Irama Jaya Harefa, S.Sos sebagai Sekretaris Dinas, SPMDP2A, Arosupratman Halawa, S.K.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2A) dan kepada Dwi

Hartini, S.E sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pembedardayaan P2A. pada hari Senin tanggal 28 September 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas, SPMDP2A, informan 1 menyatakan bahwa:

“Keputusan dalam kasus-kasus yang terkait dengan dugaan pelecehan seksual terhadap anak diambil dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan berdasarkan pada proses yang terstruktur serta berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Pertama-tama, organisasi kami memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan penanganan dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Ketika terjadi dugaan tersebut, langkah-langkah segera diambil untuk melindungi anak yang terlibat dengan memastikan keselamatan mereka menjadi prioritas utama. Tim internal yang terlatih dalam penanganan kasus-kasus semacam ini akan melakukan investigasi menyeluruh berdasarkan protokol yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi-saksi terkait, dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang jika diperlukan. Hasil investigasi akan dievaluasi secara cermat dan tidak memihak untuk menentukan langkah selanjutnya. Keputusan akan didasarkan pada fakta yang ada, dengan mempertimbangkan kepentingan dan keamanan anak, serta kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan organisasi yang berlaku. Langkah-langkah selanjutnya termasuk memberikan dukungan kepada korban, melaporkan ke pihak yang berwenang jika diperlukan, dan mengambil tindakan disipliner sesuai kebijakan organisasi terhadap pelaku jika dugaan terbukti. Seluruh proses ini dijalankan dengan penuh kehati-hatian, keadilan, dan berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap anak”

Informan menjelaskan bahwa organisasi mereka memiliki pendekatan yang sangat hati-hati dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Langkah-langkah yang mereka terapkan didasarkan pada proses yang terstruktur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pertama-tama, mereka memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan penanganan dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Saat dugaan tersebut muncul, langkah pertama yang diambil adalah untuk memastikan keselamatan anak yang terlibat menjadi prioritas utama. Tim internal yang terlatih akan melakukan investigasi menyeluruh sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi

terkait, dan kolaborasi dengan pihak yang berwenang jika diperlukan. Hasil dari investigasi tersebut dievaluasi dengan cermat dan tidak memihak untuk menentukan langkah selanjutnya. Keputusan didasarkan pada fakta yang ada, mempertimbangkan kepentingan dan keamanan anak, serta mematuhi hukum dan kebijakan organisasi. Langkah selanjutnya termasuk memberikan dukungan kepada korban, melaporkan ke pihak yang berwenang jika diperlukan, dan mengambil tindakan disipliner sesuai kebijakan organisasi terhadap pelaku jika dugaan terbukti. Keseluruhan proses ini dijalankan dengan kehati-hatian, keadilan, dan berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap anak. Ini menegaskan komitmen organisasi untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan serius dan mengutamakan keamanan serta kepentingan anak. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 mengatakan bahwa:

“Keputusan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak diambil dengan melakukan investigasi menyeluruh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tim khusus yang terdiri dari individu yang terlatih dan berkompeten dalam penanganan kasus semacam itu, memeriksa bukti-bukti dan informasi yang ada. Hasil investigasi menjadi landasan untuk menentukan tindakan lanjutan. Jika ditemukan bukti yang cukup untuk menegaskan dugaan pelecehan seksual, langkah-langkah akan diambil sesuai kebijakan yang berlaku. Ini bisa melibatkan pemberian sanksi disiplin kepada pelaku, melaporkan kasus kepada pihak berwenang, serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban. Setiap langkah yang diambil didasarkan pada keadilan, keamanan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku”

Informan menjelaskan bahwa dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak, keputusan diambil setelah dilakukan investigasi menyeluruh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mereka membentuk tim khusus yang terdiri dari individu yang terlatih dan berkompeten dalam menangani kasus semacam itu. Tim ini melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan informasi yang ada dengan teliti. Hasil dari investigasi ini menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika terdapat bukti yang cukup untuk

menegaskan dugaan pelecehan seksual, organisasi akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Tindakan tersebut bisa berupa pemberian sanksi disiplin kepada pelaku, melaporkan kasus kepada pihak berwenang, dan memberikan perlindungan serta dukungan kepada korban. Penting untuk dicatat bahwa setiap langkah yang diambil oleh organisasi didasarkan pada prinsip keadilan, keamanan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Mereka juga menegaskan pentingnya memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk menangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan anak serta mematuhi standar hukum dan kebijakan yang berlaku. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Dwi Hartini, S.E informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Keputusan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak diambil melalui serangkaian langkah yang sangat terperinci. Pertama, dilakukan investigasi menyeluruh dengan melibatkan tim yang terlatih khusus untuk menilai semua informasi dan bukti yang ada. Hasil dari investigasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat kejadian pelecehan seksual yang terbukti. Jika ditemukan bukti yang kuat, langkah-langkah segera diambil. Ini bisa melibatkan penangguhan atau pemecatan dari posisi atau jabatan, serta melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap korban adalah prioritas utama, jadi tindakan pencegahan akan diambil segera untuk melindungi korban dan mencegah kejadian serupa terulang. Seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan akan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan anak”

Informan menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak, keputusan diambil melalui serangkaian langkah yang sangat terperinci. Pertama, dilakukan investigasi menyeluruh dengan melibatkan tim yang memiliki pelatihan khusus untuk menilai semua informasi dan bukti yang ada. Hasil dari investigasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat kejadian pelecehan seksual yang terbukti. Jika

ditemukan bukti yang kuat, langkah-langkah segera diambil. Ini bisa termasuk penangguhan atau pemecatan dari posisi atau jabatan tertentu, serta melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap korban diutamakan, sehingga tindakan pencegahan akan diambil segera untuk melindungi korban dan mencegah kejadian serupa terulang. Organisasi tersebut menekankan bahwa keseluruhan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan akan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan anak. Ini menegaskan komitmen mereka dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan seksama, memprioritaskan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan anak sebagai titik fokus utama.

5. Bagaimana organisasi mengidentifikasi perubahan perilaku tiba-tiba pada anak sebagai indikator mungkin adanya pelecehan seksual?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yulius irama Jaya Harefa, S.Sos sebagai Sekretaris Dinas, SPMDP2A, Arosupratman Halawa, S.K.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2A) dan kepada Dwi Hartini, S.E sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan P2A. pada hari Senin tanggal 28 September 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas, SPMDP2A, informan 1 menyatakan bahwa:

“Organisasi dapat mengidentifikasi perubahan perilaku tiba-tiba pada anak sebagai indikator mungkin adanya pelecehan seksual dengan memperhatikan beberapa tanda atau perubahan yang mencolok. Misalnya, perubahan drastis dalam perilaku seperti menjadi lebih tertutup, cemas, atau gelisah tanpa alasan yang jelas. Selain itu, perubahan dalam performa sekolah, misalnya menurunnya nilai atau ketidakhadiran yang tidak biasa, juga bisa menjadi tanda. Perilaku yang tidak biasa seperti ketakutan terhadap situasi atau orang tertentu, serta munculnya bahasa atau pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia anak, juga dapat menjadi indikator potensial dari pelecehan seksual. Penting untuk mencatat bahwa setiap anak bereaksi berbeda terhadap pelecehan seksual, jadi perubahan perilaku ini dapat

menjadi petunjuk potensial yang memerlukan pendekatan lebih lanjut dan sensitif dalam mengidentifikasi masalah yang mendasarinya”

Informan menjelaskan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi adanya pelecehan seksual pada anak dengan memperhatikan perubahan perilaku yang mungkin terjadi. Mereka menyoroti beberapa tanda atau perubahan yang mencolok yang bisa menjadi indikator adanya pelecehan. Perubahan drastis dalam perilaku seperti menjadi lebih tertutup, cemas, atau gelisah tanpa alasan yang jelas diungkapkan sebagai salah satu indikator. Selain itu, perubahan dalam performa sekolah, seperti menurunnya nilai atau ketidakhadiran yang tidak biasa, juga menjadi pertanda yang perlu diperhatikan. Informan juga menyebutkan bahwa perilaku yang tidak biasa seperti ketakutan terhadap situasi atau orang tertentu, serta pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia anak, juga dapat menjadi indikator potensial dari pelecehan seksual. Mereka menekankan bahwa setiap anak bereaksi secara berbeda terhadap pelecehan seksual, sehingga perubahan perilaku tersebut dapat menjadi petunjuk yang perlu penanganan lebih lanjut dan sensitif dalam mengidentifikasi masalah yang mendasarinya. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 mengatakan bahwa:

“Mengamati perubahan drastis dalam perilaku anak, seperti menjadi lebih tertutup, menarik diri dari aktivitas sosial, atau tiba-tiba menunjukkan rasa takut terhadap orang tertentu”

Informan menyatakan bahwa mengamati perubahan drastis dalam perilaku anak, seperti menjadi lebih tertutup, menarik diri dari aktivitas sosial, atau tiba-tiba menunjukkan rasa takut terhadap orang tertentu dapat menjadi indikasi potensial dari situasi yang perlu dicermati lebih lanjut. Ini menegaskan pentingnya mengamati tanda-tanda perubahan perilaku pada anak sebagai kemungkinan indikator adanya masalah atau kekhawatiran yang mendasar. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Dwi

Hartini, S.E informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Mendorong komunikasi terbuka dengan anak-anak untuk memahami perubahan dalam ekspresi emosional, pola tidur atau makan yang berubah secara tiba-tiba, serta perubahan dalam kinerja akademis yang tidak biasa”

Informan menjelaskan bahwa mendorong komunikasi terbuka dengan anak-anak adalah langkah penting dalam memahami perubahan yang mungkin terjadi pada mereka. Hal ini mencakup pemahaman terhadap perubahan dalam ekspresi emosional, pola tidur, atau pola makan yang tiba-tiba berubah. Selain itu, perhatian terhadap perubahan dalam kinerja akademis yang tidak biasa juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Ini menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka dapat membantu mengidentifikasi dan memahami perubahan-perubahan tersebut yang mungkin menjadi tanda potensial dari masalah atau ketidaknyamanan yang dialami anak.

6. Bagaimana organisasi menangani kasus di mana anak menunjukkan ketakutan atau kecemasan yang tidak wajar terhadap seseorang?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yulius irama Jaya Harefa, S.Sos sebagai Sekretaris Dinas, SPMDP2A, Arosupratman Halawa, S.K.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2A) dan kepada Dwi Hartini, S.E sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan P2A. pada hari Senin tanggal 28 September 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas, SPMDP2A, informan 1 menyatakan bahwa:

“Organisasi biasanya melibatkan para profesional yang terlatih dalam penanganan anak dan pelecehan seksual untuk melakukan wawancara sensitif dengan anak tersebut. Mereka mencoba memahami penyebab ketakutan atau kecemasan yang tidak wajar terhadap orang tertentu”

Informan menjelaskan bahwa organisasi melibatkan para profesional yang terlatih khusus dalam penanganan anak dan kasus pelecehan seksual untuk melakukan wawancara sensitif dengan anak-anak yang terlibat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mencoba memahami penyebab dari ketakutan atau kecemasan yang tidak wajar yang mungkin ditunjukkan oleh anak terhadap orang tertentu. Dengan melibatkan profesional yang terlatih, organisasi berusaha untuk mengadopsi pendekatan yang sensitif dan memahami bagi anak-anak yang mungkin menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menangani situasi tersebut dengan penuh kehati-hatian dan kepekaan terhadap kondisi anak yang terlibat. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 mengatakan bahwa:

“Organisasi akan menjaga kerahasiaan informasi dan memberikan lingkungan yang aman bagi anak untuk berbicara tentang perasaan mereka. Ini bisa melibatkan konseling atau pendekatan terapi yang sesuai dengan usia anak”

Informan menjelaskan bahwa organisasi bertekad untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak agar mereka merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan mereka. Upaya ini dapat mencakup penerapan konseling atau pendekatan terapi yang sesuai dengan usia anak. Dengan menjamin kerahasiaan informasi, organisasi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa dapat berbicara tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan privasi mereka terganggu. Penyediaan layanan konseling atau terapi yang sesuai dengan usia anak menunjukkan kesungguhan mereka dalam menyediakan pendekatan yang sensitif dan mendukung untuk membantu anak-anak dalam mengatasi pengalaman yang mungkin sulit atau traumatis. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28

September 2023, peneliti bertanya kepada Dwi Hartini, S.E informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Dalam kasus yang memerlukan tindakan lebih lanjut, organisasi akan melibatkan ahli hukum atau pekerja sosial untuk memberikan bantuan dan melindungi anak tersebut, seraya tetap menjaga keamanan dan kesejahteraannya dalam proses penanganan kasus ini”

Informan menjelaskan bahwa dalam situasi yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, organisasi akan melibatkan ahli hukum atau pekerja sosial untuk memberikan bantuan dan melindungi anak yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tahap penanganan kasus. Melibatkan ahli hukum atau pekerja sosial menunjukkan bahwa organisasi berupaya untuk menyediakan dukungan yang komprehensif dan spesifik sesuai dengan kebutuhan anak yang terlibat. Hal ini juga menegaskan komitmen mereka untuk memastikan bahwa proses penanganan kasus berjalan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan kesejahteraan serta keamanan anak.

7. Bagaimana cara organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dan langkah-langkah pencegahan yang diterapkan untuk mengatasi hal ini?

Berdasarkan hasil wawancara kepada Yulius irama Jaya Harefa, S.Sos sebagai Sekretaris Dinas, SPMDP2A, Arosupratman Halawa, S.K.M sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2A) dan kepada Dwi Hartini, S.E sebagai Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan P2A. pada hari Senin tanggal 28 September 2023, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias, peneliti bertanya kepada Sekretaris Dinas, SPMDP2A, informan 1 menyatakan bahwa:

“Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan mengamati tanda-tanda seperti pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan perkembangan usia, perilaku atau bicara yang

terlalu eksplisit atau tidak pantas, serta interaksi yang tidak biasa dengan orang dewasa. Pencegahan melibatkan pendidikan yang tepat mengenai batasan-batasan perilaku seksual yang sehat dan tidak sehat, memberikan pelatihan kepada staf untuk mengenali tanda-tanda kecenderungan perilaku tidak pantas, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak merasa nyaman melaporkan situasi yang mencurigakan tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, organisasi memastikan ada kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlindungan anak dan penanganan kasus-kasus dugaan perilaku seksual yang tidak sesuai usia”

Informan menjelaskan bahwa organisasi memiliki pemahaman terhadap perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan mengamati tanda-tanda tertentu. Ini meliputi pengetahuan seksual yang tidak sejalan dengan perkembangan usia, perilaku atau ucapan yang terlalu eksplisit atau tidak pantas, serta interaksi yang tidak biasa dengan orang dewasa. Upaya pencegahan dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, melalui pendidikan yang tepat tentang batasan-batasan perilaku seksual yang sehat dan tidak sehat. Kedua, memberikan pelatihan kepada staf agar bisa mengenali tanda-tanda kecenderungan perilaku tidak pantas. Ketiga, menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak merasa nyaman melaporkan situasi yang mencurigakan tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, organisasi juga memastikan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlindungan anak dan penanganan kasus-kasus dugaan perilaku seksual yang tidak sesuai usia. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk mencegah dan menangani situasi yang melibatkan perilaku seksual yang tidak pantas terhadap anak dengan pendekatan yang holistik dan terstruktur. Begitu juga dengan informan 2, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Arosupratman Halawa, S.K.M informan 2 mengatakan bahwa:

“Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan memperhatikan tanda-tanda seperti sentuhan yang tidak lazim, percakapan atau pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia, serta perilaku yang terlalu intim terhadap orang dewasa.

Langkah-langkah pencegahan melibatkan pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda perilaku yang tidak wajar, memfasilitasi lingkungan terbuka bagi anak-anak untuk melaporkan situasi yang tidak nyaman, serta menegakkan kebijakan yang jelas dan prosedur penanganan kasus yang diatur dengan tepat terkait perlindungan anak dari perilaku seksual yang tidak sesuai usia”

Informan menjelaskan bahwa organisasi memiliki pendekatan khusus dalam mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak. Mereka mengamati beberapa tanda, termasuk sentuhan yang tidak lazim, percakapan atau pengetahuan seksual yang tidak sejalan dengan usia anak, serta perilaku yang terlalu intim terhadap orang dewasa. Upaya pencegahan yang dilakukan melibatkan beberapa langkah. Pertama, melalui pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda perilaku yang tidak wajar, sehingga mereka dapat lebih peka dan tanggap terhadap situasi yang mencurigakan. Kedua, menciptakan lingkungan terbuka bagi anak-anak untuk melaporkan situasi yang tidak nyaman atau mencurigakan, agar mereka merasa aman dan didukung saat berbagi pengalaman yang mungkin mereka alami. Ketiga, menegakkan kebijakan yang jelas dan prosedur penanganan kasus yang teratur dan sesuai terkait perlindungan anak dari perilaku seksual yang tidak sesuai usia. Pendekatan ini menunjukkan komitmen organisasi dalam memperhatikan isu sensitif ini secara serius, dengan fokus pada pelatihan staf, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak, serta memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan perilaku seksual yang tidak pantas terhadap anak. Begitu juga dengan informan 3, dengan menggunakan pertanyaan yang sama pada hari senin tanggal 28 September 2023, peneliti bertanya kepada Dwi Hartini, S.E informan 3 memberikan dukungan atas jawaban di atas dengan menyatakan bahwa:

“Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan mengobservasi tanda-tanda seperti kecenderungan berbicara atau bertindak secara seksual yang tidak lazim untuk usia mereka, pengetahuan seksual yang tidak sesuai usia, atau keterlibatan

dalam aktivitas yang tidak pantas untuk perkembangan usia mereka. Pencegahan dilakukan melalui pelatihan staf untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai, edukasi kepada anak-anak tentang batasan perilaku yang sehat, serta peningkatan kesadaran di antara orang tua dan komunitas tentang pentingnya memahami dan melindungi anak dari perilaku seksual yang tidak sesuai usia. Organisasi juga menerapkan kebijakan perlindungan anak yang jelas dan prosedur untuk menangani kasus-kasus yang mencurigakan secara tepat dan terperinci”

Informan menjelaskan bahwa organisasi memperhatikan beberapa tanda perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak, termasuk kecenderungan berbicara atau bertindak secara seksual yang tidak lazim untuk usia mereka, pengetahuan seksual yang tidak sejalan dengan usia, atau keterlibatan dalam aktivitas yang tidak pantas untuk perkembangan usia mereka. Upaya pencegahan dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pelatihan staf untuk dapat mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai, sehingga mereka lebih mampu mengenali dan menangani situasi yang mencurigakan dengan lebih sensitif. Kedua, edukasi kepada anak-anak tentang batasan perilaku yang sehat, yang merupakan langkah penting untuk membantu mereka memahami apa yang tidak pantas dan memberikan mereka alat untuk menghadapi situasi yang mungkin mereka alami. Ketiga, meningkatkan kesadaran di antara orang tua dan komunitas tentang pentingnya memahami serta melindungi anak dari perilaku seksual yang tidak sesuai usia, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung perlindungan anak. Selain itu, organisasi juga menegakkan kebijakan perlindungan anak yang jelas dan prosedur yang terperinci untuk menangani kasus-kasus yang mencurigakan. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap anak-anak, serta untuk menangani masalah dengan kehati-hatian dan dengan langkah-langkah yang terstruktur.

Tabel 4.1 Tabulasi Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan | Kesimpulan |
|----|------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | Bagaimana | 1. Pendekatan antar pribadi di | Para informan konsisten |

| | | |
|---|--|---|
| <p>pendekatan antar pribadi di dalam organisasi ini mempengaruhi upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak</p> | <p>dalam organisasi sangat penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Budaya kerja yang mempromosikan komunikasi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan pentingnya melindungi anak-anak dapat menjadi landasan yang kuat dalam mencegah pelecehan seksual. Ketika hubungan antar pribadi di organisasi didasarkan pada saling menghormati, kepercayaan, dan kesadaran akan hak asasi manusia, karyawan lebih mungkin untuk mengenali tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponsnya dengan tepat. Kesadaran akan pentingnya memberikan ruang aman bagi anak-anak untuk berbicara juga menjadi bagian penting dari pendekatan antar pribadi ini. Komitmen kolektif untuk melindungi anak-anak dan memastikan bahwa mereka merasa didukung dan</p> | <p>menyatakan bahwa pendekatan antar pribadi di dalam organisasi memainkan peran penting dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Budaya kerja yang mempromosikan komunikasi terbuka, menghargai perbedaan, dan kesadaran akan perlindungan anak-anak menciptakan landasan yang kuat dalam mencegah kasus pelecehan. Ketika hubungan antar individu di organisasi didasarkan pada saling menghormati, kepercayaan, dan kesadaran akan hak asasi manusia, anggota organisasi lebih mungkin mengenali tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan meresponsnya dengan tepat. Komitmen bersama untuk melindungi anak-anak, menciptakan ruang yang aman bagi mereka, dan memastikan dukungan dari seluruh komunitas organisasi menjadi inti dari upaya pencegahan pelecehan seksual.</p> |
|---|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>dilindungi oleh seluruh komunitas organisasi adalah kunci dalam mencegah pelecehan seksual.</p> <p>2. Pendekatan antar pribadi di dalam organisasi memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Keterbukaan komunikasi yang kuat antara anggota organisasi dapat memungkinkan identifikasi dan pelaporan perilaku yang mencurigakan atau kasus pelecehan. Budaya yang mempromosikan saling percaya dan dukungan dapat membantu individu merasa aman untuk melaporkan kejadian yang tidak pantas. Selain itu, peran pemimpin yang membangun lingkungan yang inklusif, mendukung, dan melindungi anak-anak juga sangat penting. Pelatihan terkait etika, kepedulian terhadap anak, serta kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten juga membantu mendorong</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan organisasi.</p> <p>3. Pendekatan antar pribadi di dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Budaya komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap individu dapat menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa nyaman untuk melaporkan situasi yang mencurigakan atau tidak aman. Ketika staf dan anggota organisasi saling menghormati satu sama lain, ini menciptakan kesadaran akan pentingnya menghormati dan melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan. Selain itu, ketika ada hubungan antar pribadi yang kuat dan saling mendukung di dalam organisasi, orang-orang cenderung lebih peduli terhadap keamanan dan kesejahteraan anak-</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | anak, serta lebih waspada terhadap tanda-tanda pelecehan seksual yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pendekatan antar pribadi yang positif dan terbuka di dalam organisasi dapat menjadi faktor penting dalam mencegah pelecehan seksual pada anak. | |
|--|--|--|--|

Tabel 4.2 Tabulasi Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan | Kesimpulan |
|----|---|---|---|
| 2 | Apa langkah konkret yang diambil untuk memastikan hubungan interpersonal yang sehat dan mendukung di lingkungan tempat kerja atau program yang dilaksanakan | 1. Pertama, pendidikan dan pelatihan yang teratur diberikan kepada semua anggota organisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang etika profesional, batasan yang tepat dalam hubungan interpersonal, serta tanda-tanda pelecehan seksual, didirikan kebijakan yang jelas dan tegas terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan pelecehan seksual. Kebijakan ini harus ditegakkan secara konsisten dan disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi. | Para informan telah menekankan beberapa langkah penting dalam mencegah pelecehan seksual di dalam organisasi. Edukasi dan pelatihan teratur, kebijakan yang jelas terkait perlindungan anak, menciptakan budaya terbuka, komunikasi transparan, memfasilitasi hubungan yang positif, memberikan dukungan konseling, serta evaluasi teratur atas kebijakan yang diterapkan adalah poin utama yang perlu dilakukan. Keseluruhan rangkaian |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Ketiga, menciptakan budaya terbuka di mana orang merasa nyaman untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas atau situasi yang mencurigakan tanpa takut akan konsekuensi negatif. Keempat, mempromosikan komunikasi yang terbuka dan transparan di antara anggota organisasi, baik melalui pertemuan reguler, forum diskusi, atau sarana komunikasi lainnya. Kelima, memfasilitasi pengembangan hubungan yang positif antara anggota organisasi melalui kegiatan sosial, pengakuan atas pencapaian, serta dukungan dan kolaborasi dalam proyek-proyek kerja. Keenam, memberikan akses dan sumber daya yang memadai untuk konseling atau bantuan bagi anggota organisasi yang membutuhkan dukungan dalam mengelola hubungan interpersonal yang kompleks atau dalam</p> | <p>langkah ini bertujuan membangun budaya kerja yang inklusif, mendukung, dan aman bagi seluruh anggota organisasi, dengan fokus pada perlindungan dan pencegahan pelecehan seksual.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>menghadapi situasi yang menantang.</p> <p>2. Organisasi dapat mengambil langkah-langkah konkret dengan memulai dari pembangunan budaya kerja yang inklusif dan aman. Hal ini melibatkan penyusunan kebijakan yang jelas terkait dengan etika hubungan antarpribadi di tempat kerja, dengan fokus pada menjaga profesionalisme dan menghormati batasan pribadi. Selanjutnya, pendekatan aktif dalam memberikan pelatihan kepada staf dan anggota organisasi tentang pengenalan tanda-tanda pelecehan seksual serta cara untuk merespons dan melaporkan situasi yang mencurigakan. Penting juga untuk memfasilitasi saluran komunikasi yang terbuka dan aman bagi anggota organisasi agar mereka merasa nyaman dalam berbagi permasalahan atau kekhawatiran terkait hubungan antarpribadi di</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>lingkungan kerja. Dukungan psikologis dan sumber daya yang tersedia juga menjadi hal penting untuk membantu individu mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam hubungan interpersonal. Terakhir, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil, serta mengadakan forum atau sesi refleksi untuk terus meningkatkan budaya kerja yang mendukung dan memastikan lingkungan yang aman bagi semua anggota organisasi.</p> <p>3. Membangun kebijakan yang jelas, memberikan pelatihan mengenai tanda-tanda pelecehan, memfasilitasi komunikasi terbuka, menyediakan sumber daya dukungan, dan melakukan evaluasi berkala</p> | |
|--|--|---|--|

Tabel 4.3 Tabulasi Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan | Kesimpulan |
|----|------------|--------------------|----------------------------|
| 3 | Peran yang | 1. Organisasi kami | Ketiga organisasi memiliki |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Berhubungan dengan Informasi (Informational Role)</p> <p>Bagaimana organisasi Anda memastikan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual tersebar luas di masyarakat dan di lingkungan internal organisasi</p> | <p>memastikan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual tersebar luas dengan berbagai cara. Kami mengadakan kampanye publik melalui media sosial, situs web, dan saluran komunikasi daring lainnya untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya perlindungan anak dan langkah-langkah pencegahan pelecehan seksual. Di lingkungan internal, kami menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan pertemuan rutin yang difokuskan pada edukasi mengenai tanda-tanda pelecehan seksual, prosedur pelaporan, dan bagaimana mendukung korban pelecehan. Selain itu, kami menciptakan materi informasi yang mudah diakses oleh staf melalui intranet atau platform internal kami. Kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait, seperti sekolah, lembaga perlindungan anak, atau</p> | <p>strategi yang beragam untuk menyebarkan informasi pencegahan pelecehan seksual. Semua melibatkan kampanye publik melalui media sosial, situs web, dan saluran daring untuk menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat luas. Di lingkungan internal, mereka menyelenggarakan beragam acara edukasi seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan untuk staf dan anggota. Kolaborasi dengan lembaga terkait, sekolah, serta komunitas lokal menjadi aspek penting dalam memperluas jangkauan pesan pencegahan dan memperkuat jejaring dukungan. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah dan LSM juga dilakukan untuk memastikan penyebaran informasi yang luas di semua lapisan masyarakat. Seluruh organisasi menunjukkan komitmen yang serupa dalam menyebarkan informasi pencegahan pelecehan seksual secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan ini.</p> |
|---|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>komunitas lokal, juga menjadi bagian penting dalam memastikan informasi pencegahan pelecehan seksual tersedia secara luas. Melalui kolaborasi ini, kami memperluas jangkauan pesan pencegahan dan memperkuat jejaring dukungan untuk melindungi anak-anak dari risiko pelecehan seksual.</p> <p>2. Organisasi kami memastikan informasi tentang pencegahan pelecehan seksual tersebar luas dengan strategi komunikasi yang beragam. Kami menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye daring untuk menjangkau masyarakat luas. Di dalam organisasi, informasi ini disampaikan melalui pelatihan reguler, seminar, dan materi edukatif yang diberikan kepada staf dan anggota. Selain itu, kami menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dan sekolah untuk</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>menyebarkan informasi ini dalam komunitas secara lebih langsung melalui acara, workshop, dan kegiatan penyuluhan. Upaya kolaboratif dengan pemerintah, LSM, dan komunitas lokal juga menjadi bagian dari usaha kami untuk memastikan informasi pencegahan pelecehan seksual tersebar luas di semua lapisan masyarakat.</p> <p>3. Organisasi kami memperluas informasi tentang pencegahan pelecehan seksual melalui berbagai saluran komunikasi. Kami aktif menggunakan media sosial, situs web, dan kampanye daring untuk mencapai masyarakat. Di internal, kami menyelenggarakan sesi penyuluhan, workshop, dan pelatihan rutin yang melibatkan staf dan anggota organisasi. Selain itu, kami mengadakan kerja sama dengan sekolah, lembaga terkait, dan komunitas lokal</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>untuk menyebarkan pesan pencegahan ini melalui kegiatan bersama, seminar, dan kampanye informasi yang lebih terarah. Kerjasama dengan pemerintah dan LSM juga menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan penyebaran informasi yang luas tentang pencegahan pelecehan seksual.</p> | |
|--|--|---|--|

Tabel 4.4 Tabulasi Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan | Kesimpulan |
|----|---|--|---|
| 4 | Apakah ada strategi khusus yang digunakan untuk mendiseminasi informasi yang akurat dan relevan kepada berbagai pihak terkait | 1. Kami mengandalkan beberapa strategi untuk memastikan diseminasi informasi yang akurat dan relevan kepada pihak terkait. Pertama, kami melakukan penelitian yang cermat untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan didukung oleh data yang valid dan relevan dengan isu pelecehan seksual. Selanjutnya, kami menggunakan platform komunikasi yang sesuai dengan preferensi dan | Ketiga organisasi memiliki pendekatan yang serupa dalam memastikan diseminasi informasi yang akurat dan relevan terkait pencegahan pelecehan seksual. Mereka melakukan riset cermat untuk menyajikan informasi yang didukung oleh data yang valid. Menggunakan beragam platform komunikasi, termasuk media sosial, surat elektronik, dan pertemuan langsung, menjadi strategi untuk mencapai kelompok sasaran dengan pesan yang |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>kebiasaan penerima informasi, seperti media sosial, surat elektronik, atau pertemuan langsung, untuk mencapai berbagai kelompok dengan pesan yang disesuaikan. Kolaborasi dengan ahli dan lembaga yang menghususkan diri dalam pencegahan pelecehan seksual juga membantu kami menyampaikan informasi yang lebih terperinci dan terfokus kepada pihak terkait. Terakhir, kami memperhatikan umpan balik yang diterima dari penerima informasi untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan strategi diseminasi kami agar lebih efektif.</p> <p>2. Menerapkan beberapa strategi untuk menyebarkan informasi yang tepat dan relevan kepada pihak terkait. Salah satunya adalah menyusun materi komunikasi yang mudah dipahami dan relevan</p> | <p>disesuaikan. Adapun pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok, serta pemanfaatan platform digital seperti webinar, video edukatif, dan infografis, memungkinkan informasi tersebar dengan lebih mudah kepada berbagai pihak. Kolaborasi dengan ahli dan lembaga terkait juga menjadi bagian penting dalam menyajikan informasi yang terperinci dan relevan. Selain itu, respons terhadap umpan balik menjadi kunci dalam penyesuaian dan peningkatan terus-menerus terhadap strategi diseminasi informasi mereka.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>dengan kebutuhan setiap kelompok, seperti orangtua, anak-anak, guru, atau staf organisasi. Kami juga melakukan penyesuaian bahasa dan pendekatan komunikasi sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok sasaran, agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif. Selain itu, kami memanfaatkan platform digital yang berbeda, seperti webinar, video edukatif, infografis, atau panduan online, agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Upaya kolaborasi dengan ahli, organisasi terkait, dan advokat juga membantu kami dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada berbagai pihak terkait.</p> <p>3. menerapkan beberapa strategi untuk menyebarkan informasi yang tepat dan relevan kepada pihak terkait. Salah satunya adalah menyusun materi</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>komunikasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan setiap kelompok, seperti orangtua, anak-anak, guru, atau staf organisasi. Kami juga melakukan penyesuaian bahasa dan pendekatan komunikasi sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok sasaran, agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan secara efektif. Selain itu, kami memanfaatkan platform digital yang berbeda, seperti webinar, video edukatif, infografis, atau panduan online, agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Upaya kolaborasi dengan ahli, organisasi terkait, dan advokat juga membantu kami dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan kepada berbagai pihak terkait</p> | |
|--|--|--|--|

Tabel 4.5 Tabulasi Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan | Kesimpulan |
|----|--|---|--|
| 5 | Bagaimana keputusan diambil dalam kasus-kasus yang terkait dengan dugaan pelecehan seksual terhadap anak | 1. Keputusan dalam kasus-kasus yang terkait dengan dugaan pelecehan seksual terhadap anak diambil dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan berdasarkan pada proses yang terstruktur serta berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Pertama-tama, organisasi kami memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan penanganan dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Ketika terjadi dugaan tersebut, langkah-langkah segera diambil untuk melindungi anak yang terlibat dengan memastikan keselamatan mereka menjadi prioritas utama. Tim internal yang terlatih dalam penanganan kasus-kasus semacam ini akan melakukan investigasi menyeluruh berdasarkan protokol yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan pengumpulan | Ketiga organisasi mengambil pendekatan yang cermat dan terstruktur dalam mengambil keputusan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Mereka memiliki kebijakan yang jelas dan terstruktur terkait penanganan kasus semacam ini, yang mengutamakan keselamatan anak dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Tim khusus yang terlatih dilibatkan dalam investigasi menyeluruh, dengan langkah-langkah yang memperhitungkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Hasil investigasi menjadi landasan untuk menentukan tindakan selanjutnya, yang bisa termasuk memberikan sanksi disiplin kepada pelaku, melaporkan kasus kepada pihak berwenang, memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban, serta mengambil tindakan pencegahan. Seluruh proses pengambilan keputusan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>bukti, wawancara dengan saksi-saksi terkait, dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang jika diperlukan. Hasil investigasi akan dievaluasi secara cermat dan tidak memihak untuk menentukan langkah selanjutnya. Keputusan akan didasarkan pada fakta yang ada, dengan mempertimbangkan kepentingan dan keamanan anak, serta kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan organisasi yang berlaku. Langkah-langkah selanjutnya termasuk memberikan dukungan kepada korban, melaporkan ke pihak yang berwenang jika diperlukan, dan mengambil tindakan disipliner sesuai kebijakan organisasi terhadap pelaku jika dugaan terbukti. Seluruh proses ini dijalankan dengan penuh kehati-hatian, keadilan, dan berlandaskan pada prinsip perlindungan terhadap anak.</p> <p>2. Keputusan terkait dugaan</p> | <p>dilakukan dengan penuh kehati-hatian, keadilan, dan berdasarkan pada prinsip perlindungan terhadap anak.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>pelecehan seksual terhadap anak diambil dengan melakukan investigasi menyeluruh sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Tim khusus yang terdiri dari individu yang terlatih dan berkompeten dalam penanganan kasus semacam itu, memeriksa bukti-bukti dan informasi yang ada. Hasil investigasi menjadi landasan untuk menentukan tindakan lanjutan. Jika ditemukan bukti yang cukup untuk menegaskan dugaan pelecehan seksual, langkah-langkah akan diambil sesuai kebijakan yang berlaku. Ini bisa melibatkan pemberian sanksi disiplin kepada pelaku, melaporkan kasus kepada pihak berwenang, serta memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban. Setiap langkah yang diambil didasarkan pada keadilan, keamanan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, serta</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku.</p> <p>3. Keputusan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak diambil melalui serangkaian langkah yang sangat terperinci. Pertama, dilakukan investigasi menyeluruh dengan melibatkan tim yang terlatih khusus untuk menilai semua informasi dan bukti yang ada. Hasil dari investigasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah terdapat kejadian pelecehan seksual yang terbukti. Jika ditemukan bukti yang kuat, langkah-langkah segera diambil. Ini bisa melibatkan penangguhan atau pemecatan dari posisi atau jabatan, serta melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap korban adalah prioritas utama, jadi tindakan pencegahan akan diambil segera untuk melindungi korban dan</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | mencegah kejadian serupa terulang. Seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan akan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan anak. | |
|--|--|--|--|

Tabel 4.6 Tabulasi Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan | Kesimpulan |
|----|---|---|--|
| 6 | Bagaimana organisasi mengidentifikasi perubahan perilaku tiba-tiba pada anak sebagai indikator mungkin adanya pelecehan seksual | 1. Organisasi dapat mengidentifikasi perubahan perilaku tiba-tiba pada anak sebagai indikator mungkin adanya pelecehan seksual dengan memperhatikan beberapa tanda atau perubahan yang mencolok. Misalnya, perubahan drastis dalam perilaku seperti menjadi lebih tertutup, cemas, atau gelisah tanpa alasan yang jelas. Selain itu, perubahan dalam performa sekolah, misalnya menurunnya nilai atau ketidakhadiran yang tidak biasa, juga bisa menjadi tanda. Perilaku yang tidak biasa seperti ketakutan terhadap situasi atau orang | Ketiga informan menekankan bahwa perubahan perilaku tiba-tiba pada anak bisa menjadi indikasi adanya pelecehan seksual. Mereka merinci perubahan tersebut sebagai penurunan dalam interaksi sosial, perubahan dalam ekspresi emosional, ketakutan terhadap orang tertentu, dan pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia. Penurunan performa akademis, pola tidur atau makan yang berubah, serta perubahan ekspresi emosional juga disoroti sebagai tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Mereka semua menekankan bahwa respons anak terhadap pelecehan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>tertentu, serta munculnya bahasa atau pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia anak, juga dapat menjadi indikator potensial dari pelecehan seksual. Penting untuk mencatat bahwa setiap anak bereaksi berbeda terhadap pelecehan seksual, jadi perubahan perilaku ini dapat menjadi petunjuk potensial yang memerlukan pendekatan lebih lanjut dan sensitif dalam mengidentifikasi masalah yang mendasarinya.</p> <p>2. Mengamati perubahan drastis dalam perilaku anak, seperti menjadi lebih tertutup, menarik diri dari aktivitas sosial, atau tiba-tiba menunjukkan rasa takut terhadap orang tertentu.</p> <p>3. Mendorong komunikasi terbuka dengan anak-anak untuk memahami perubahan dalam ekspresi emosional, pola tidur atau makan yang berubah secara tiba-tiba, serta perubahan dalam kinerja akademis yang tidak</p> | <p>seksual dapat bervariasi, sehingga penting untuk mendekati perubahan perilaku ini dengan sensitivitas dan pendekatan yang lebih dalam untuk mengidentifikasi masalah yang mendasarinya.</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|-------|--|
| | | biasa | |
|--|--|-------|--|

Tabel 4.7 Tabulasi Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan | Kesimpulan |
|----|---|--|--|
| 7 | Bagaimana organisasi menangani kasus dimana anak menunjukkan ketakutan atau kecemasan yang tidak wajar terhadap seseorang | <p>1. Organisasi biasanya melibatkan para profesional yang terlatih dalam penanganan anak dan pelecehan seksual untuk melakukan wawancara sensitif dengan anak tersebut. Mereka mencoba memahami penyebab ketakutan atau kecemasan yang tidak wajar terhadap orang tertentu.</p> <p>2. Organisasi akan menjaga kerahasiaan informasi dan memberikan lingkungan yang aman bagi anak untuk berbicara tentang perasaan mereka. Ini bisa melibatkan konseling atau pendekatan terapi yang sesuai dengan usia anak.</p> <p>3. Dalam kasus yang memerlukan tindakan lebih lanjut, organisasi akan melibatkan ahli hukum atau pekerja sosial untuk memberikan bantuan dan</p> | <p>Para informan menyoroti langkah-langkah penting yang diambil organisasi dalam menangani dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Mereka mencatat bahwa organisasi melibatkan profesional terlatih untuk melakukan wawancara sensitif dengan anak demi memahami ketakutan atau kecemasan yang tidak wajar. Selain itu, organisasi menjamin kerahasiaan informasi dan menciptakan lingkungan aman bagi anak untuk berbicara tentang perasaan mereka, bahkan melalui konseling atau terapi yang sesuai dengan usia mereka. Dalam kasus yang memerlukan langkah lebih lanjut, organisasi akan melibatkan ahli hukum atau pekerja sosial untuk memberikan bantuan dan melindungi anak tersebut, tetap memprioritaskan keamanan dan kesejahteraannya selama proses</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | melindungi anak tersebut, seraya tetap menjaga keamanan dan kesejahteraannya dalam proses penanganan kasus ini | penanganan kasus. Semua langkah ini menekankan perlunya perlindungan dan dukungan komprehensif bagi anak yang terlibat dalam situasi pelecehan seksual. |
|--|--|--|---|

Tabel 4.8 Tabulasi Hasil Wawancara

| No | Pertanyaan | Jawaban Informan | Kesimpulan |
|----|--|--|--|
| 8 | Bagaimana cara organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dan langkah-langkah pencegahan yang diterapkan untuk mengatasi hal ini | 1. Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan mengamati tanda-tanda seperti pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan perkembangan usia, perilaku atau bicara yang terlalu eksplisit atau tidak pantas, serta interaksi yang tidak biasa dengan orang dewasa. Pencegahan melibatkan pendidikan yang tepat mengenai batasan-batasan perilaku seksual yang sehat dan tidak sehat, memberikan pelatihan kepada staf untuk mengenali | Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan mengamati tanda-tanda seperti pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan perkembangan usia, perilaku atau bicara yang terlalu eksplisit atau tidak pantas, serta interaksi yang tidak biasa dengan orang dewasa. Pencegahan melibatkan pendidikan yang tepat mengenai batasan-batasan perilaku seksual yang sehat dan tidak sehat, memberikan pelatihan kepada staf untuk mengenali tanda-tanda kecenderungan perilaku tidak pantas, serta |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>tanda-tanda kecenderungan perilaku tidak pantas, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak merasa nyaman melaporkan situasi yang mencurigakan tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, organisasi memastikan ada kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlindungan anak dan penanganan kasus-kasus dugaan perilaku seksual yang tidak sesuai usia.</p> <p>2. Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan memperhatikan tanda-tanda seperti sentuhan yang tidak lazim, percakapan atau pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia, serta perilaku yang terlalu intim terhadap orang dewasa. Langkah-langkah pencegahan melibatkan pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda perilaku yang tidak wajar, memfasilitasi lingkungan</p> | <p>menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak merasa nyaman melaporkan situasi yang mencurigakan tanpa rasa takut atau malu. Selain itu, organisasi memastikan ada kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlindungan anak dan penanganan kasus-kasus dugaan perilaku seksual yang tidak sesuai usia.</p> <p>2. Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan memperhatikan tanda-tanda seperti sentuhan yang tidak lazim, percakapan atau pengetahuan seksual yang tidak sesuai dengan usia, serta perilaku yang terlalu intim terhadap orang dewasa. Langkah-langkah pencegahan melibatkan pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda perilaku yang tidak wajar, memfasilitasi lingkungan terbuka bagi anak-anak untuk melaporkan situasi yang tidak nyaman, serta menegakkan kebijakan yang jelas dan prosedur penanganan kasus yang diatur dengan tepat</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>terbuka bagi anak-anak untuk melaporkan situasi yang tidak nyaman, serta menegakkan kebijakan yang jelas dan prosedur penanganan kasus yang diatur dengan tepat terkait perlindungan anak dari perilaku seksual yang tidak sesuai usia.</p> <p>3. Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan mengobservasi tanda-tanda seperti kecenderungan berbicara atau bertindak secara seksual yang tidak lazim untuk usia mereka, pengetahuan seksual yang tidak sesuai usia, atau keterlibatan dalam aktivitas yang tidak pantas untuk perkembangan usia mereka. Pencegahan dilakukan melalui pelatihan staf untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai, edukasi kepada anak-anak tentang batasan perilaku yang sehat, serta peningkatan kesadaran di antara orang tua dan</p> | <p>terkait perlindungan anak dari perilaku seksual yang tidak sesuai usia.</p> <p>Organisasi mengenali perilaku seksual yang tidak sesuai usia pada anak dengan mengobservasi tanda-tanda seperti kecenderungan berbicara atau bertindak secara seksual yang tidak lazim untuk usia mereka, pengetahuan seksual yang tidak sesuai usia, atau keterlibatan dalam aktivitas yang tidak pantas untuk perkembangan usia mereka. Pencegahan dilakukan melalui pelatihan staf untuk mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai, edukasi kepada anak-anak tentang batasan perilaku yang sehat, serta peningkatan kesadaran di antara orang tua dan komunitas tentang pentingnya memahami dan melindungi anak dari perilaku seksual yang tidak sesuai usia. Organisasi juga menerapkan kebijakan perlindungan anak yang jelas dan prosedur untuk menangani kasus-kasus yang mencurigakan secara tepat dan</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|-------------|
| | | komunitas tentang pentingnya memahami dan melindungi anak dari perilaku seksual yang tidak sesuai usia. Organisasi juga menerapkan kebijakan perlindungan anak yang jelas dan prosedur untuk menangani kasus-kasus yang mencurigakan secara tepat dan terperinci. | terperinci. |
|--|--|---|-------------|

4.3 Pembahasan

4.3.1 Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Nias terlibat dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga informan penelitian tentang pendekatan antar pribadi di dalam organisasi ini mempengaruhi upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Pendekatan antar pribadi di dalam sebuah organisasi bisa memainkan peran penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual pada anak. Jika budaya organisasi didasarkan pada komunikasi terbuka, kepercayaan, dan kesadaran akan isu-isu sensitif seperti pelecehan seksual pada anak, ini bisa mempengaruhi bagaimana upaya pencegahan dilakukan.

1. Kesadaran dan Pendidikan; Budaya organisasi yang mempromosikan kesadaran akan isu pelecehan seksual pada anak dapat mendorong anggota untuk mengenali tanda-tanda, mengerti konsekuensinya, dan merespons dengan tepat.
2. Pelatihan dan Keterampilan; Jika ada program pelatihan yang berfokus pada pencegahan pelecehan seksual pada anak, budaya organisasi yang mendukung dan mendorong partisipasi dalam pelatihan semacam itu bisa meningkatkan kemampuan anggota dalam mengatasi masalah ini.

3. Kebijakan yang Jelas; Budaya organisasi yang menekankan kepatuhan pada kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlindungan anak dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak yang terlibat dengan organisasi tersebut.
4. Komitmen terhadap Keadilan dan Perlindungan Anak; Jika pemimpin dan anggota organisasi memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan dan perlindungan anak, hal ini dapat tercermin dalam setiap aspek pekerjaan mereka, termasuk dalam upaya pencegahan pelecehan seksual.

4.3.2 Apa saja kebijakan, program, dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam mencegah pelecehan seksual pada anak

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga informan penelitian tentang kebijakan, program, dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam mencegah pelecehan seksual pada anak. Terdapat langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh organisasi, seperti Dinas Sosial Kabupaten Nias, dalam mencegah pelecehan seksual pada anak. Langkah-langkah konkret untuk pencegahan pelecehan seksual pada anak:

1. Pendidikan, Pelatihan, dan Kebijakan
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Teratur; Memberikan pendidikan dan pelatihan teratur kepada semua anggota organisasi mengenai etika profesional, tanda-tanda pelecehan seksual, dan batasan hubungan interpersonal yang tepat.
 - b) Kebijakan Perlindungan Anak yang Jelas: Mendirikan kebijakan yang tegas terkait perlindungan anak dan pencegahan pelecehan seksual yang ditegakkan secara konsisten dan disosialisasikan kepada seluruh anggota.
2. Membangun Budaya Terbuka dan Aman
 - a) Budaya Terbuka; Menciptakan budaya di mana anggota merasa nyaman melaporkan perilaku yang mencurigakan tanpa takut konsekuensi negatif.

- b) Komunikasi Terbuka; Memfasilitasi komunikasi terbuka dan transparan antar anggota organisasi melalui berbagai sarana.
3. Dukungan dan Kolaborasi
- a) Hubungan Positif; Mendorong pengembangan hubungan positif antar anggota melalui kegiatan sosial, pengakuan atas pencapaian, dan dukungan dalam proyek-proyek kerja.
 - b) Akses Terhadap Bantuan; Menyediakan akses dan sumber daya yang memadai untuk konseling atau bantuan bagi anggota yang membutuhkan dukungan dalam mengelola hubungan interpersonal yang kompleks.
4. Langkah-langkah Konkret
- a) Kebijakan Etika Kerja; Menyusun kebijakan yang jelas terkait etika hubungan antarpribadi di tempat kerja, menjaga profesionalisme, dan menghormati batasan pribadi.
 - b) Pelatihan Tanda-tanda Pelecehan; Melakukan pelatihan aktif kepada staf tentang pengenalan tanda-tanda pelecehan seksual dan cara merespons serta melaporkannya.
 - c) Saluran Komunikasi Aman; Memfasilitasi saluran komunikasi yang terbuka dan aman bagi anggota untuk berbagi permasalahan terkait hubungan antarpribadi di lingkungan kerja.
 - d) Dukungan Psikologis; Menyediakan dukungan psikologis dan sumber daya bagi individu yang menghadapi masalah dalam hubungan interpersonal.
5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
- Evaluasi Kebijakan dan Langkah-langkah; Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil.
- Refleksi dan Peningkatan; Mengadakan forum atau sesi refleksi untuk terus meningkatkan budaya kerja yang mendukung dan memastikan lingkungan yang aman bagi semua anggota.

Langkah-langkah ini dapat menjadi dasar untuk membangun lingkungan yang aman dan inklusif, yang menempatkan perlindungan anak dan pencegahan pelecehan seksual pada posisi penting. Hasilnya, diharapkan akan tercipta lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai, dilindungi, dan didukung dalam menjalankan tugasnya.

4.3.3 Bagaimana efektivitas langkah-langkah yang telah diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga informan penelitian tentang langkah-langkah yang telah diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak. Efektivitas langkah-langkah ini dapat dinilai berdasarkan beberapa faktor:

1. Respons dan Kepatuhan terhadap Kebijakan: Sejauh mana kebijakan yang telah dibuat diterapkan dan dipatuhi oleh anggota organisasi dalam menangani kasus pelecehan seksual.
2. Pelatihan dan Pendidikan: Seberapa efektif pelatihan yang diberikan kepada staf dan anggota organisasi dalam mengenali tanda-tanda pelecehan seksual dan meresponsnya.
3. Keterbukaan dan Kultur Organisasi: Bagaimana budaya organisasi telah berkembang, apakah telah tercipta lingkungan di mana pelaporan dan pembicaraan terbuka tentang kasus pelecehan seksual didukung dan dihargai.
4. Ketersediaan Dukungan dan Sumber Daya: Sejauh mana organisasi menyediakan dukungan, seperti konseling atau bantuan, bagi korban dan individu yang terlibat dalam penanganan kasus pelecehan seksual.
5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Apakah terdapat evaluasi secara rutin terhadap langkah-langkah yang diambil, serta apakah ada upaya untuk terus memperbaiki sistem dan prosedur dalam menangani kasus pelecehan seksual,

Hasil dari wawancara dengan tiga informan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa efektif langkah-langkah yang telah diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak. Analisis dari perspektif internal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana upaya tersebut bekerja dan di mana mungkin terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil wawancara tiga informan penelitian, terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Nias telah mengambil sejumlah langkah konkret dalam mencegah pelecehan seksual pada anak. Langkah-langkah ini meliputi pendidikan dan pelatihan teratur bagi anggota organisasi, pembangunan budaya terbuka dan aman, serta penyediaan dukungan bagi individu yang membutuhkan. Namun, efektivitas dari langkah-langkah ini memerlukan evaluasi mendalam. Faktor-faktor seperti tingkat respons terhadap kebijakan, efektivitas pelatihan, keterbukaan dalam

budaya organisasi, ketersediaan dukungan, dan proses evaluasi yang terus-menerus perlu dipertimbangkan.

5.2 Saran

1. Penting untuk melakukan evaluasi secara teratur terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan atau peningkatan.
2. Memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat benar-benar ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi.
3. Mengaktifkan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi dalam upaya pencegahan pelecehan seksual, termasuk memastikan pemahaman yang mendalam terkait tindakan yang harus diambil saat terjadi kasus pelecehan.
4. Terus mendorong terciptanya lingkungan yang terbuka untuk melaporkan kasus-kasus yang mencurigakan dan menyediakan dukungan yang lebih luas bagi korban.
5. Setiap hasil evaluasi harus dijadikan dasar untuk terus memperbaiki sistem, prosedur, serta program yang ada guna meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak.







PERAN ORGANISASI DALAM PENCEGAHAN PELECEHAN SESKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NIAS)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89
